



LAPORAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
ANGKATAN 1 TAHUN 2018

Optimalisasi Hasil Penelitian Bidang Politik Dalam Negeri
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan Memanfaatkan
Infografis

Oleh :

SITI CHAERANI DEWANTI, S.Ars., M.Si.

NIP. 198704292018012001

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2018

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN HASIL AKTUALISASI
PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
ANGKATAN 2018**

Nama : Siti Chaerani Dewanti
NIP : 19870429 201801 2 001
Jabatan : Calon Peneliti Pertama
Instansi : Pusat Penelitian BK DPR RI

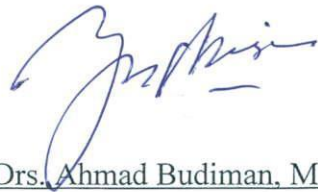
Bogor, Oktober 2018

Mengetahui,
Coach



DR. Ujianto Singgih P., M.Si
NIP 19641119 199003 1 003

Menyetujui,
Mentor



Drs. Ahmad Budiman, M.Pd
NIP 19690422 199703 1 004

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
A. Organisasi / Unit Kerja.....	4
B. Tupoksi Jabatan Peserta.....	6
C. Deskripsi Isu.....	6
D. Nilai-Nilai Organisasi.....	7
E. Tujuan.....	8
BAB II.....	9
Isu “Masih Belum Optimalnya Diseminasi Hasil Penelitian Bidang Politik dalam Negeri (PDN) Pusat Penelitian BK DPR RI”.....	9
1. Penjelasan Perubahan.....	9
2. Capaian Pelaksanaan Aktualisasi.....	10
3. Analisis Manfaat dan Dampak.....	10
4. Hambatan Aktualisasi.....	11
BAB III.....	13
BAB IV.....	17
A. Kesimpulan.....	17
B. Saran.....	18
LAMPIRAN.....	20
A. Lampiran 1. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi	
B. Lampiran 2. Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor	
C. Lampiran 3. Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach	
D. Lampiran 4. Bukti-bukti Pendukung Kegiatan	
E. Lampiran 5. Matriks Progres Desain Infografis Hasil Penelitian	
F. Lampiran 6. Testimoni Diseminasi Hasil Penelitian melalui Infografis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Organisasi / Unit Kerja

Berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No.6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretariat Jenderal No. 2 Tahun 2016, maka Pusat Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, Pusat Penelitian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

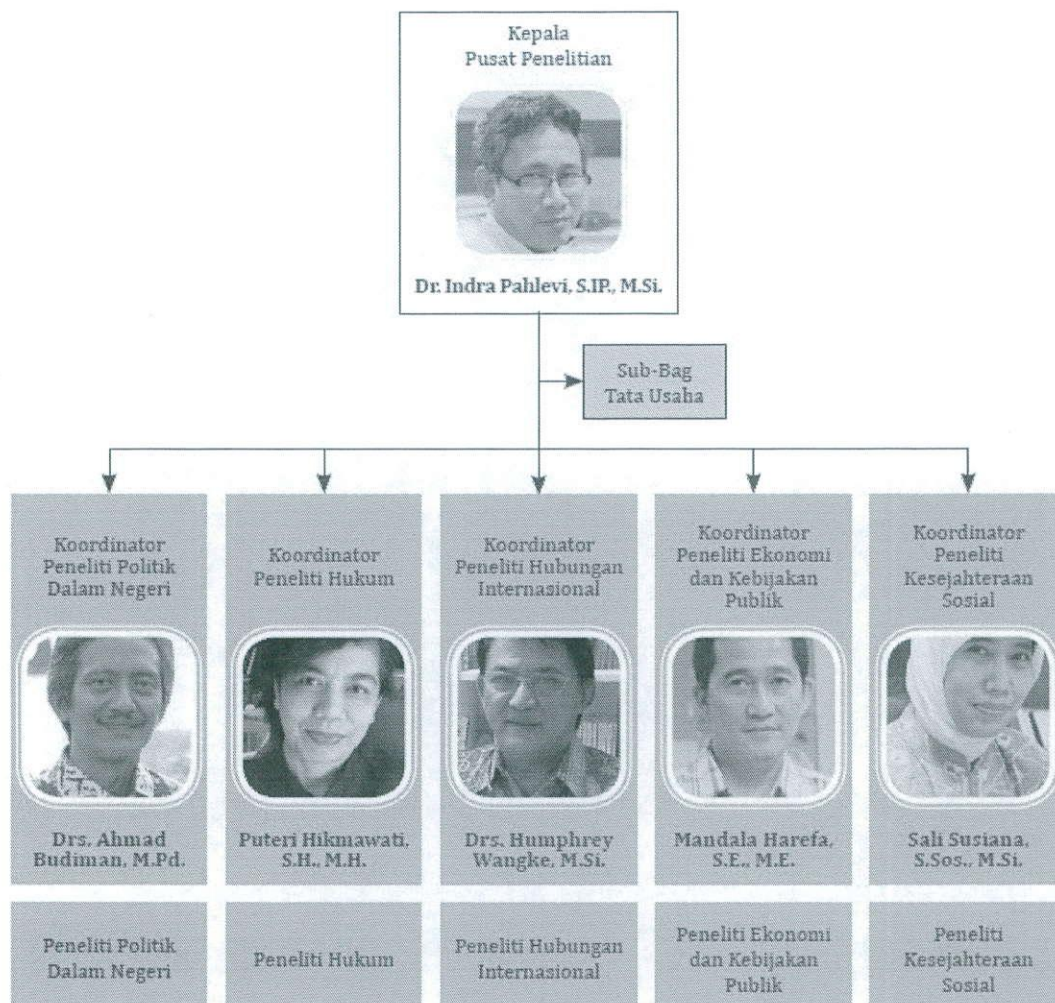
1. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Penelitian;
2. Perumusan evaluasi program kerja tahunan Pusat Penelitian;
3. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Penelitian;
4. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Penelitian;
5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pengkajian dan penelitian;
6. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan penelitian;
7. Pelaksanaan dukungan evaluasi penelitian;
8. Pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian;
9. Pelaksanaan tata usaha penelitian;
10. Penyusunan laporan kinerja Pusat Penelitian
11. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian

Adapun Visi Pusat Penelitian adalah **“menjadi Pusat Penelitian yang profesional, netral, andal, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya parlemen modern”**.

Sedangkan Misi Pusat Penelitian adalah:

1. Mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional, netral, dan akuntabel.
2. Memberikan dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang profesional, netral, dan akuntabel.
3. Melakukan pengembangan kepakaran dan kompetensi yang andal.

Struktur Organisasi Pusat Penelitian BK DPR RI



Pusat Penelitian BK DPR RI terdiri atas 5 (lima) bidang yakni:

1. Peneliti Bidang Politik Dalam Negeri
2. Peneliti Bidang Hukum
3. Peneliti Bidang Hubungan Internasional
4. Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik
5. Peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial

Penulis sendiri ditempatkan di bidang Politik Dalam Negeri (PDN)

B. Tupoksi Jabatan Peserta

Tugas dan fungsi Peneliti Pertama adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian mengenai perkembangan issue-issue kedewanan Undang-Undang (legislasi), Anggaran, dan Pengawasan.
2. Melakukan analisis dan kajian-kajian mengenai kedewanan (Undang-Undang (legislasi), Anggaran, dan Pengawasan)
3. Membuat karya tulis ilmiah sesuai dengan kebutuhan dewan dalam rangka proses pembahasan Undang-Undang, Anggaran, dan Pengawasan
4. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan

C. Deskripsi Isu

Permasalahan yang diangkat adalah:

1. Keterbatasan waktu anggota DPR sebagai user hasil penelitian untuk membaca laporan hasil penelitian.
2. Banyak produk-produk hasil penelitian Puslit BK DPR yang akan didiseminasikan.
3. Perlu dirumuskannya suatu inovasi untuk diseminasi hasil yang efektif dan efisien untuk dipahami, terutama untuk menunjang kinerja dewan.

Dampak isu diseminasi hasil penelitian ini jika tidak diselesaikan adalah hasil-hasil penelitian yang selama ini telah dikerjakan menjadi tidak bermanfaat

untuk menunjang kerja dewan dalam legislasi, anggaran, maupun pengawasan **(Pelayanan Publik)**.

Diseminasi hasil penelitian bidang PDN merupakan bagian dari keterbukaan informasi Puslit BK DPR RI kepada publik, dimana publik bagi Puslit BK DPR RI tidak hanya kepada masyarakat luas, tetapi juga kepada anggota dewan **(Akuntabilitas, Komitmen Mutu)**. Sedangkan pembuatan produk infografis merupakan suatu inovasi untuk Puslit BK DPR RI, karena selama ini produk penelitian yang akan didiseminasikan hanya berupa eksam atau pun buku. Keluaran produk penelitian apabila kemudian salah satunya dibuat dalam bentuk infografis, diharapkan dapat memudahkan proses diseminasi, meningkatkan pelayanan informasi serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerrdaskan kehidupan bangsa **(Akuntabilitas, Komitmen Mutu, Pelayanan Publik)**.

Dengan demikian, rumusan isu peserta adalah **“Masih Belum Optimalnya Diseminasi Hasil Penelitian Bidang Politik Dalam Negeri (PDN) Pusat Penelitian BK DPR RI.”**

D. Nilai-Nilai Organisasi

Badan Keahlian DPR RI merupakan aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI. Oleh karena itu BK DPR RI juga mengikuti Nilai Dasar Kinerja Setjen DPR RI. Nilai dasar tersebut tertuang dalam Peraturan Sekretariat Jendral (Persekjen) No.03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI pasal III yang menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar PNS Sekjen & BK DPR RI adalah Religius, Akuntabel, Profesional, dan Integritas (RAPI).

- ✓ **(R)**eligius: percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berberperilaku sesuai dengan ajaran agama.
- ✓ **(A)**kuntabel: bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan, memberikan teladan bagi lingkungan kerja, serta memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana kedinasan sesuai dengan peruntuka

- ✓ **(P)rofessional**: mengembangkan etos kerja untuk meningkatkan kinerja Setjen dan BK DPR RI, bekerja dengan inisiatif, inovatif, dan responsif, berorientasi pada peningkatan kualitas kerja, dan/atau memiliki dan berusaha meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan
- ✓ **(I)ntegritas**: jujur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PNS; menjunjung tinggi harkat martabat dan kehormatan Setjen & BK DPR RI; menaati semua peraturan yang berlaku; tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; tidak merugikan orang lain dan negara; menjaga informasi yang bersifat rahasia; menghormati perbedaan, tidak diskriminatif, dan tidak mengintimidasi rekan kerja.

E. Tujuan

Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Jennet dan Premkumar (1996) menyebutkan bahwa setiap hasil riset yang telah dilakukan, perlu dipublikasikan dan diseminasikan. Manfaatnya adalah hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam bidang tertentu¹.

Bagi Puslit BK DPR RI, diseminasi hasil penelitian digunakan sebagai salah satu *input* pertimbangan yang digunakan oleh anggota DPR RI dalam menunjang kinerja, baik dalam fungsinya legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Selain itu, diseminasi hasil penelitian bidang PDN diharapkan dapat meningkatkan pelayanan informasi serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan diangkatnya isu terkait belum optimalnya diseminasi hasil penelitian bidang PDN adalah untuk menghadirkan satu gagasan inovasi baru agar pendiseminasian hasil penelitian dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

¹ <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080821010832AAJD9mz> (diakses tanggal 19 Mei 2018)

BAB II

CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Isu “Masih Belum Optimalnya Diseminasi Hasil Penelitian Bidang Politik dalam Negeri (PDN) Pusat Penelitian BK DPR RI”.

1. Penjelasan Perubahan

Secara umum tidak ada perubahan mendasar pada pelaksanaan aktualisasi ini. Namun terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan pada beberapa tahapan kegiatan karena pada pelaksanaannya, penulis harus melakukan kegiatan utama penulis sebagai peneliti, yakni melakukan penelitian ke lapangan dan penulisan buku. Selain itu, beberapa kegiatan yang memerlukan diskusi dengan rekan kerja senior juga mengalami penyesuaian karena kesibukan yang bersangkutan.

Pada kegiatan 1, yaitu mengumpulkan hasil penelitian yang akan didiseminasikan yang terdiri dari 4 tahapan kegiatan, tidak mengalami perubahan. Semua kegiatan dilakukan juga sesuai dengan timeline.

Kegiatan 2 adalah melakukan diskusi terkait hasil penelitian PDN, yang terdiri dari 4 tahapan kegiatan. Pada saat perancangan, diskusi direncanakan hanya satu kali. Tetapi karena terkendala dengan kesibukan narasumber, maka diskusi dilakukan dua kali. Tetapi semua tahapan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan timeline.

Kegiatan 3 adalah mengetahui cara pembuatan infografis yang baik. Pencarian informasi dilakukan melalui diskusi dengan mengundang pakar infografis dari Tirto.id serta mencari referensi. Referensi yang didapat umumnya berasal dari website-website desain grafis. Pelaksanaan kegiatan 3 ini juga tidak mengalami perubahan timeline.

Kegiatan 4 (pembimbingan infografis) dan kegiatan 5 (pembuatan infografis) secara umum mengalami perubahan pelaksanaan, karena kegiatan pembimbingan dan pembuatan infografis berjalan secara beriringan. Pada saat pembuatan

infografis, kegiatan pembimbingan juga dilakukan agar proses penarikan substansi dan proses kreatif dapat terelaborasi dengan tepat. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga terpotong dengan kegiatan penelitian penulis selama 1 minggu. Sehingga waktu pembuatan infografis sedikit tertunda.

Kegiatan 6, merupakan kegiatan tambahan yang dilakukan setelah mendapat masukan dari penguji serta mentor dan coach. Bahwasannya isu yang diangkat adalah terkait dengan ‘diseminasi’ maka sudah seharusnya tahapan final dari penyelesaian isu adalah proses diseminasi dari hasil penelitian yang sudah mengalami inovasi. Oleh karena itu tambahan kegiatan ke 6 adalah ‘pendiseminasian infografis hasil penelitian bidang PDN melalui *website* Puslit dan komisi terkait’.

2. Capaian Pelaksanaan Aktualisasi

Sebagaimana tertuang pada **Lampiran 1. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi**

3. Analisis Manfaat dan Dampak

Adapun manfaat setelah melaksanakan tahapan kegiatan aktualisasi adalah sebagai berikut

- a. Bagi penulis, menyelesaikan kegiatan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN dapat menghasilkan kegiatan yang berkualitas dan mampu berinovasi untuk mengoptimalkan diseminasi hasil penelitian.
- b. Bagi Pusat Penelitian, pelaksanaan tahapan kegiatan penyelesaian isu tersebut dapat menciptakan suatu inovasi produk penelitian Puslit agar pada saat diseminasi hasil penelitian dapat lebih efisien dan efektif. Selain itu penyelesaian isu yang diangkat dapat menguatkan visi Puslit BK DPR RI yaitu menjadi Pusat Penelitian yang Profesional dan Akuntabel.
- c. Bagi Setjen dan BK DPR RI, dengan pendiseminasian hasil penelitian dalam bentuk infografis hasil penelitian yang optimal, maka dapat meningkatkan nilai-nilai dasar kinerja Setjen DPR RI yaitu Akuntabel, Profesional, dan Integritas.

- d. Bagi Stakeholders di lingkungan DPR RI adalah anggota Dewan. Dengan terdiseminasinya hasil penelitian secara optimal maka dapat menunjang kinerja dewan, utamanya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Sedangkan dampak yang terjadi apabila isu yang diangkat tidak diselesaikan, terutama dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS serta kedudukan dan peran PNS dalam NKRI adalah diseminasi hasil penelitian tidak akan terselenggara dengan optimal karena tidak adanya inovasi untuk menjadi lebih baik, sehingga tidak mencerminkan visi Puslit BK DPR RI sebagai lembaga yang profesional, andal, dan akuntabel.

4. Hambatan Aktualisasi

Pelaksanaan aktualisasi habituasi dari Mei hingga September 2018 tentu tidak lepas dari beberapa kendala, antara lain:

- a. Produk hasil penelitian yang akan didiseminasikan ada yang berupa laporan atau pun ringkasan eksekutif. Namun isi laporan yang ada di dalam buku tersebut tidak memiliki format pembabakan penulisan yang sama. Akibatnya ketika laporan tersebut akan dielaborasi ke dalam bentuk infografis menjadi sulit. Pembabakan di infografis juga menjadi tidak seragam.

Akibat lebih lanjutnya adalah berpengaruh pada proses kreatif pembuatan infografis itu sendiri. Waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama karena harus mengidentifikasi yang mana merupakan temuan di lapangan, analisis penelitian, atau rekomendasi penelitian.

- b. Proses pembuatan infografis memerlukan keterampilan khusus. Alternatif pembuatan infografis yang cepat dapat menggunakan *templates* yang tersedia di internet (contoh: piktochart.com). Tapi penggunaan *template* tersebut pun mengalami kendala, antara lain:

- jika menggunakan akun gratis (*free user*), maka desain dan ikon grafis yang tersedia hanya sedikit. Akibatnya tidak banyak ikon infografis yang bisa digunakan sehingga tidak cukup untuk menghasilkan suatu infografis yang baik dan menarik (komposisi gambar:tulisan = 70:30). Selain itu jika menggunakan akun gratis, maka akhir dari desain yang dibuat akan

terdapat *watermark* yang secara keseluruhan akan merusak tampilan infografis dan menurunkan prestise karya itu sendiri.

- untuk dapat mengakses *unlimited* template & design dapat berlangganan akun premium, dengan membayar iuran \$12,5 - \$ 24 per bulan.

Sedangkan dari Puslit belum memiliki anggaran untuk itu.

- c. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pembuatan infografis memakan waktu yang tidak sebentar. Apabila untuk pembuatan infografis juga dikerjakan oleh peneliti yang melakukan penelitian tersebut, sudah pasti akan menambah beban kerja tersendiri. Padahal pembuatan infografis, walaupun sebagai bagian dari diseminasi penelitian, tidak termasuk dalam tugas Peneliti. Oleh karena itu, pembuatan infografis tersebut dikhawatirkan dapat membuat pekerjaan utama peneliti untuk membuat kajian dan rumusan dalam menunjang tugas kedewanan menjadi terbengkalai.

BAB III

JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI		JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Mengumpulkan hasil penelitian bidang PDN yang akan diseminasikan				Libur Lebaran							Penelitian di Lapangan							
	a) Konsultasi dengan koordinator bidang																		
	b) Melakukan koordinasi dengan peneliti bidang PDN																		
	c) Mengumpulkan hasil penelitian kelompok di bidang PDN yang sudah selesai																		
	d) Mengidentifikasi latar belakang masalah, tujuan, hasil penelitian, dan rekomendasi penelitian																		
2.	Melakukan diskusi terkait hasil penelitian bidang PDN				Libur Lebaran							Penelitian di Lapangan							
	a) Konsultasi dengan koordinator bidang																		
	b) Membuat pedoman wawancara / diskusi																		

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI		JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER						
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
	c) Menghubungi para peneliti senior (tim penelitian) untuk memohon waktu diskusi				Libur Lebaran																	
	d) Berdiskusi dengan tim penelitian yang sudah menyelesaikan laporan hasil penelitiannya untuk memverifikasi temuan identifikasi di kegiatan 1																					
3	Mengetahui cara pembuatan infografis yang baik																					
	a) Konsultasi dengan koordinator bidang																					
	b) Mencari literatur / referensi infografis di perpustakaan																					
	c) Mencari referensi infografis di website																					
	d) Membuat pedoman bimbingan / diskusi																					
	e) Menghubungi narasumber yang berkompetensi di infografis untuk meminta kesediaan waktunya																					
	f) Melakukan diskusi terbatas dengan narasumber yang berkompetensi di infografis																					
	g) Melaporkan dan mendiskusikan hasil review dengan mentor																					
					Libur Lebaran																	
					Libur Lebaran																	
					Libur Lebaran																	

Pembuatan Laporan Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI		JUNI			JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER					
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
4	Pembimbingan pembuatan infografis				Libur Lebaran							Penelitian di Lapangan								
	a) Konsultasi dengan koordinator bidang PDN																			
	b)Menentukan data penelitian kelompok bidang PDN yang akan dibuat ke dalam bentuk infografis																			
	c) Menghubungi narasumber yang berkompetensi di infografis untuk meminta kesediaan waktunya																			
	d)Pembimbingan pembuatan infografis oleh rekan kerja yang berkomptensi di bidang infografis																			
	e) Melaporkan dan mendiskusikan hasil bimbingan infografis dengan mentor																			
5	Pembuatan infografis hasil penelitian bidang PDN yang telah ditentukan & laporan kepada Tim Koordinasi Penelitian																			
	a) Konsultasi dengan koordinator bidang																			
	b) Menentukan konten, narasi, sketsa, dan brainstorming infografis																			
	c) Membuat draf desain infografis awal																			
Pembuatan Laporan Aktualisasi																				

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI		JUNI			JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER					
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
	d)Pemaparan draf desain infografis awal dengan tim penelitian kelompok, dan koordinator bidang PDN				Libur Lebaran							Penelitian di Lapangan								
	e) Finalisasi design																			
	f) Melaporkan hasil design infografis ke koordinator bidang & tim koordinasi penelitian Puslit																			
6	Pendiseminasian infografis hasil penelitian bidang PDN melalui <i>website</i> Puslit dan komisi terkait																			
	a) Mencetak infografis hasil penelitian PDN																			
	b)Mendistribusikan infografis hasil penelitian PDN ke komisi terkait																			
	c) Berkoordinasi dengan admin <i>website</i> Puslit untuk pemuatan infografis																			
	d)Menyerahkan <i>soft file</i> infografis ke admin website																			
Pembuatan Laporan Aktualisasi																				

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk menjawab isu “Masih belum optimalnya diseminasi hasil penelitian bidang Politik Dalam Negeri (PDN) Pusat Penelitian BKD DPR RI”, penulis telah melaksanakan rancangan habituasi sejak Mei III hingga September 2018. Kegiatan aktualisasi tersebut yaitu:

- a. Kegiatan 1 - Mengumpulkan hasil penelitian bidang PDN yang akan didiseminasikan. Saya memahami bahwa laporan hasil penelitian adalah bagian dari akuntabilitas peneliti sebagai ASN. Selain itu konsekuensinya adalah hasil penelitian harus dapat digunakan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan utamanya untuk meningkatkan kinerja dewan (**Akuntabilitas, Etika Publik, Manajemen ASN, dan WoG**).
- b. Kegiatan 2 - Melakukan diskusi terkait hasil penelitian bidang PDN. Diskusi dilakukan dengan tim penelitian untuk memverifikasi identifikasi substansi. Diskusi yang dilakukan dengan tetap memperhatikan sopan santun (**WoG dan Etika Publik**).
- c. Kegiatan 3 - Mengetahui cara pembuatan infografis yang baik. Infografis dijadikan usulan inovasi karena dianggap penyampaian informasi secara visual dianggap lebih mudah dan cepat ditangkap bagi pembacanya. Pencarian referensi infografis yang baik ini dilakukan melalui diskusi dengan mengundang pakar dan pencarian informasi melalui internet (**Komitmen Mutu**).
- d. Kegiatan 4 - Pembimbingan Pembuatan Infografis. Kegiatan pembimbingan infografis dilakukan untuk mengembangkan budaya kerja yang berorientasi pada mutu, membangun kerja sama kolegal, dan bagian dari adaptasi pada perubahan (**Komitmen Mutu**).
- e. Kegiatan 5 - Pembuatan infografis hasil penelitian dan laporan kepada Tim Koordinasi Penelitian. Pembuatan infografis merupakan bagian dari mengembangkan budaya kerja dan menghasilkan suatu inovasi bagi hasil penelitian agar lebih optimal pada saat didiseminasi (**Komitmen Mutu-WoG**).

- f. Kegiatan 6 - Pendiseminasian infografis hasil penelitian bidang PDN. Diseminasi infografis merupakan bagian dari keterbukaan informasi Puslit kepada publik. Publik bagi Puslit adalah tidak hanya masyarakat luas, tetapi juga kepada anggota dewan. Diseminasi dilakukan melalui 2 (dua) media, yaitu media tercetak dan media elektronik. Media tercetak berupa *flyer/leaflet* yang dapat disisipkan pada buku exsum. Sehingga bagi anggota dewan yang memiliki keterbatasan waktu, dapat membaca infografis tersebut untuk memahami intisari hasil penelitian. Sedangkan diseminasi via media elektronik adalah melalui pemuatan infografis pada website Puslit (www.puslit.dpr.go.id) dan email ke komisi terkait (**Akuntabilitas dan Pelayanan Publik**).

Dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu nilai ANEKA dan mengetahui kedudukan serta peran ASN, penulis dapat menghasilkan pekerjaan yang dapat menguatkan visi dan misi Puslit pada khususnya, serta visi misi Setjen & BK DPR RI pada umumnya. Selain itu penulis secara pribadi merasa menjadi ASN yang dapat berkontribusi secara nyata dan lebih profesional.

B. Saran

Agar pembuatan hasil penelitian dalam bentuk infografis ini dapat mengoptimalkan diseminasi, maka saran untuk Puslit adalah:

- a. Dalam pembuatan laporan, tim penelitian dan TKP perlu menyamakan format pembabakan penulisan (misalnya permasalahan, temuan di lapangan, analisis, dan rekomendasi), sehingga ketika akan dielaborasi dalam bentuk infografis menjadi lebih mudah diidentifikasi.
- b. Perlu membentuk atau merekrut satu tim khusus untuk pembuatan infografis, misal tim desainer grafis. Dengan adanya tim khusus tersebut maka pembuatan infografis tidak akan mengganggu tugas dan fungsi utama peneliti. Selain itu dengan merekrut tenaga yang memang sudah ahli, dapat menghasilkan produk infografis yang bagus dan menarik yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra dan kinerja anggota dewan.
- c. Perlu standarisasi bentuk infografis Puslit agar ketika infografis disebarkan ke publik, dapat langsung tercirikan bahwa infografis tersebut merupakan hasil

penelitian dari Puslit BK DPR RI. Pembakuan tersebut mencakup mulai sistematika eksum penelitian, bentuk, ukuran, layout, logo, dan sebagainya.

d. Puslit perlu menetapkan standar operasional prosedur (SOP) Pembuatan Infografis, sebagai berikut:

1. Tim penelitian mengumpulkan exsum penelitian yang sudah memiliki standar format pembabakan yang seragam.
2. Tim infografis menerima exsum dan melakukan identifikasi konten yang akan dibuat
3. Tim infografis melakukan diskusi hasil penelitian untuk mengkonfirmasi identifikasi materi
4. Tim infografis membuat konten infografis sambil tetap berkoordinasi dengan tim penelitian terkait
5. Mengajukan verifikasi desain infografis kepada tim penelitian dan TKP Bidang
6. Meminta *approval* Kepala Puslit
7. Diseminasi infografis melalui website Puslit, *email*, dan komisi yang terkait.

Sedangkan masukan untuk penyelenggara adalah melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar CPNS Golongan III Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2018 ini dapat menjadi preseden bagi penyelenggara pelatihan untuk melakukan Latsar di tahun selanjutnya. Dengan memperbaiki segala kekurangan pelaksanaan dan menyempurnakan yang sudah baik, untuk kemajuan Pusdiklat Setjen DPR RI.

LAMPIRAN

A. Lampiran 1. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Mengumpulkan hasil penelitian kelompok bidang PDN yang akan diseminasikan	➤ Konsultasi dengan koordinator bidang; ➤ Melakukan koordinasi dengan peneliti bidang PDN; ➤ Mengumpulkan hasil penelitian kelompok di bidang PDN yang sudah selesai; ➤ Mengidentifikasi latar belakang masalah, tujuan, hasil penelitian, dan rekomendasi penelitian	Laporan pokok-pokok hasil penelitian kelompok bidang PDN	Untuk memulai pengumpulan hasil penelitian bidang yang akan diseminasikan, saya telah menemui beberapa pihak yang terkait dengan memperhatikan nilai-nilai sopan santun (WoG - etika publik). Saya telah memahami bahwa hasil penelitian adalah sebuah bagian dari pertanggungjawaban peneliti dengan BK DPR RI. Laporan hasil penelitian tersebut	Dengan pelaksanaan pengumpulan hasil penelitian bidang yang akan diseminasikan, maka telah mendukung pencapaian misi Puslit BK DPR yaitu mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional dan akuntabel	Dengan mengumpulkan hasil penelitian bidang yang akan diseminasikan, maka nilai organisasi Setjen & BK DPR RI yaitu Akuntabilitas dan Integritas telah dapat diperkuat

				adalah perwujudan dari akuntabilitas peneliti sebagai ASN. Konsekuensinya adalah hasil penelitian tersebut harus dapat digunakan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan utamanya untuk meningkatkan fungsi kinerja dewan. Hasil penelitian bidang yang saya diseminasikan, adalah hasil penelitian kelompok bidang PDN tahun 2016 & 2017 <i>(akuntabilitas - manajemen ASN)</i>		
2.	Melakukan diskusi terkait hasil penelitian bidang PDN	➤ Konsultasi dengan koordinator bidang; ➤ Membuat pedoman wawancara / diskusi; ➤ Menghubungi para peneliti senior (tim	Laporan singkat kegiatan diskusi	Diskusi hasil penelitian selalu memperhatikan nilai-nilai etika sopan santun. Materi diskusi adalah untuk memverifikasi temuan	Mendiskusikan hasil penelitian bidang merupakan salah satu bagian dari realisasi misi Puslit BK DPR RI yaitu mengoptimalkan	Dengan mendiskusikan hasil penelitian bidang, maka telah dapat menguatkan nilai Profesional

		penelitian) untuk memohon waktu diskusi; ➤ Berdiskusi dengan tim penelitian yang sudah menyelesaikan laporan hasil penelitiannya untuk meverifikasi temuan identifikasi di kegiatan 1;		identifikasi yang akan dijadikan konten infografis (<i>etika publik - WoG</i>)	dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional	pada Sekjen dan BK DPR RI
3.	Mengetahui cara pembuatan infografis yang baik	➤ Konsultasi dengan koordinator bidang; ➤ Mencari referensi infografis di website; ➤ Membuat pedoman bimbingan / diskusi; ➤ Menghubungi narasumber yang berkompetensi di infografis untuk meminta kesediaan waktunya; ➤ Melakukan diskusi terbatas dengan	✓ Kumpulan referensi dan catatan mengenai infografis; ✓ Laporan singkat diskusi dengan narasumber	Infografis adalah sebuah usulan inovasi salah satu produk penelitian. Di era informasi sekarang ini, infografis merupakan salah satu tren perkembangan dalam menyebarkan informasi. Infografis adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembacanya agar dapat	Mengetahui cara pembuatan infografis yang baik maka merupakan perwujudan salah satu misi Puslit BK DPR RI yaitu melakukan pengembangan kepakaran dan kompetensi SDM yang andal	Dengan mengetahui cara pembuatan infografis yang baik, maka nilai organisasi Setjen & BK DPR RI yaitu Profesioanl dapat lebih meningkat

		narasumber yang berkompetensi di infografis; ➤ Melaporkan dan mendiskusikan hasil review dengan mentor		dipahami lebih mudah dan cepat. Penyampaian informasi secara visual dianggap lebih menguntungkan dibandingkan melalui teks karena informasi yang ditangkap secara visual akan diproses sekaligus oleh otak (<i>komitmen mutu</i>).		
4.	Pembimbingan pembuatan infografis	➤ Konsultasi dengan koordinator; ➤ Menentukan data penelitian kelompok bidang PDN yang akan dibuat ke dalam bentuk infografis; ➤ Menghubungi narasumber yang berkompetensi di infografis untuk meminta kesediaan waktunya; ➤ Pembimbingan	✓ Laporan kegiatan pembimbingan ✓ Draf konsep infografis	Pembimbingan pembuatan infografis merupakan bagian dari strategi manajemen mutu, yakni mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekedar formalitas menggururkan kewajiban, membangun kerjasama kolegal antar pegawai, serta bagian dari adaptasi dengan	Pembimbingan pembuatan infografis merupakan perwujudan misi Puslit BK DPR RI yaitu melakukan pengembangan kepakaran dan kompetensi SDM yang andal	Dengan pembimbingan pembuatan infografis, maka dapat meningkatkan nilai Profesional di lingkungan Setjen dan BK DPR RI

		pembuatan infografis oleh narasumber yang berkompetensi di bidang infografis; ➤ Melaporkan dan mendiskusikan hasil bimbingan infografis dengan mentor		tuntutan perubahan. <i>(komitmen mutu - WoG)</i>		
5.	Pembuatan infografis hasil penelitian bidang PDN yang telah ditentukan & laporan kepada Tim Koordinasi Penelitian	➤ Konsultasi dengan koordinator bidang; ➤ Menentukan konten, narasi, sketsa, brainstorming infografis; ➤ Membuat draf desain infografis awal; ➤ Pemaparan draf desain infografis awal dengan tim penelitian kelompok, dan koordinator bidang PDN ➤ Finalisasi design ➤ Melaporkan hasil desain infografis ke	✓ Produk infografis yang siap diseminasi; ✓ Laporan singkat presentasi hasil infografis	Penelitian. Pembuatan infografis merupakan bagian dari mengembangkan budaya kerja dan menghasilkan suatu inovasi bagi hasil penelitian agar lebih optimal pada saat didiseminasi <i>(komitmen mutu - WoG)</i>	Dengan pembuatan infografis, maka telah mendukung visi Puslit BK DPR RI yaitu menjadi Pusat Penelitian yang profesional dan akuntabel	Dengan pembuatan infografis, maka telah meningkatkan nilai Profesional dan Integritas di lingkungan Setjen dan BK DPR RI

		koordinator bidang PDN & tim koordinasi penelitian Puslit				
6.	Pendiseminasian infografis hasil penelitian bidang PDN kepada komisi terkait dan melalui <i>website</i> Puslit	➤ Mencetak infografis hasil penelitian PDN ➤ Mendistribusikan infografis hasil penelitian PDN ke komisi terkait ➤ Berkoordinasi dengan admin <i>website</i> Puslit untuk pemuatan infografis ➤ Menyerahkan <i>soft file</i> infografis ke admin <i>website</i>	✓ Infografis terdistribusi ke komisi terkait ✓ Infografis termuat di website puslit	Diseminasi infografis hasil penelitian bidang PDN merupakan bagian dari keterbukaan informasi Puslit kepada publik. Publik bagi Puslit tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada anggota dewan. Dengan diseminasi hasil penelitian bidang PDN melalui infografis dapat meningkatkan peran Puslit dalam memberikan pelayanan informasi, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa (<i>akuntabilitas</i>)	Dengan pendiseminasian infografis hasil penelitian bidang PDN, maka akan dapat menguatkan visi Puslit BK DPR RI yaitu menjadi Pusat Penelitian yang profesional dan akuntabel	Dengan pendiseminasian infografis hasil penelitian bidang PDN, maka dapat meningkatkan nilai Profesional dan Integritas di lingkungan Setjen dan BK DPR RI

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	:	Siti Chaerani Dewanti
NIP	:	19870429 201801 2 001
Unit Kerja	:	Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Jabatan	:	Calon Peneliti
Isu	:	Masih belum optimalnya diseminasi hasil penelitian bidang Politik Dalam Negeri (PDN) Pusat Penelitian BK DPR RI
Nama Mentor	:	Drs. Ahmad Budiman, M.Pd

- 1) Kegiatan 1: Mengumpulkan hasil penelitian kelompok bidang Politik Dalam Negeri yang akan diseminasikan

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Tahapan kegiatan sudah dilakukan sesuai jadwal	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Data hasil penelitian kelompok PDN yg akan diseminasikan	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Sudah menerapkan substansi agenda nilai dasar ASN & peran ASN	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Mendukung visi & misi puslit Bk DPR (profesional & akuntabel)	
Penguatan Nilai Organisasi	Memperkuat nilai akuntabilitas dan integritas Setjen DPR	

2) Kegiatan 2 : Melakukan diskusi terkait hasil penelitian bidang Politik Dalam Negeri

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Kegiatan diskusi sudah dilakukan sesuai jadwal	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Notulensi & dokumentasi diskusi	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Terdapat keterkaitan antara substansi mata pelatihan dengan kegiatan	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Terdapat kontribusi untuk Tusi karena mendukung visi & misi puslit yaitu profesional	
Penguatan Nilai Organisasi	Meningkatkan nilai : profesional setjen DPR RI	

3) Kegiatan 3 : Mengetahui cara pembuatan infografis yang baik

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Cara pembuatan infografis mengundang pakar (Tirto.id) dan referensi sudah baik !	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Referensi dan makalah pakar ok!	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Telah menerapkan komitmen mutu.	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	mendukung visi & misi Puslit, diseminasi, pengembangan kompetensi SDM. Lanjutkan!	
Penguatan Nilai Organisasi	memperkuat nilai profesional !	

4) Kegiatan 4 : Pembimbingan pembuatan infografis

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Tahap pembimbingan berjalan konsisten & berkelanjutan	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Draft infografis ada. ok!	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	komitmen Mutu & WOG	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	mendukung pencapaian misi Puslit	
Penguatan Nilai Organisasi	Aluntabel & Profesional	

- 5) Kegiatan 5 : Pembuatan infografis hasil penelitian bidang PDN yang telah ditentukan & laporan kepada Tim Koordinasi Penelitian

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Pembuatan infografis telah berjalan dengan baik	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Draf awal - final desain ok!	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	komitmen mutu, baik	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	mendukung visi & misi organisasi	
Penguatan Nilai Organisasi	profesional, akuntabel, & integritas	

- 6) Kegiatan 6 : Pendiseminasian infografis hasil penelitian bidang PDN kepada komisi terkait dan melalui *website* Puslit

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Mendiseminasikan hasil penelitian dengan infografis sudah dilaksanakan	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Hasil sudah diseminasikan ke website puslit & komisi	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Nilai Akuntabilitas	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Mendukung visi & misi puslit dengan di mendiseminasikan hasil penelitian	
Penguatan Nilai Organisasi	profesional, akuntabel, integritas	

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	:	Siti Chaerani Dewanti
NIP	:	19870429 201801 2 001
Unit Kerja	:	Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Jabatan	:	Calon Peneliti
Isu	:	Masih belum optimalnya diseminasi hasil penelitian bidang Politik Dalam Negeri (PDN) Pusat Penelitian BK DPR RI
Nama Coach	:	DR. Ujianto Singgih P., M.Si

- 1) Kegiatan 1: Mengumpulkan hasil penelitian kelompok bidang Politik Dalam Negeri yang akan diseminasikan

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Mengumpulkan hasil penelitian kelompok bidang politik melalui koordinasi, koordinasi - Ok -	070618 / Presentasi
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Data hasil penelitian yg diseminasi sbg bahan acuan menyusun informasi Ok	Proses
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Konsep WOB, Etika Publik Ok	Proses
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Hasil penelitian mendukung Pencapaian Misi & Visi Org Ok -	Proses
Penguatan Nilai Organisasi	Akuntabel, Integritas Ok	Presentasi

2) Kegiatan 2 : Melakukan diskusi terkait hasil penelitian bidang Politik Dalam Negeri

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	diskusi hasil penelitian sesuai jadwal Ok !	diskusi widi
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	lapsing, kegiatan diskusi Ok !	widi
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	memerapka Elemen publik WoO - Ok	widi
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Mendukung pencapaian Visi & misi Pusri Ok	widi
Penguatan Nilai Organisasi	Memutakhir, Proklamasi Ok	widi

3) Kegiatan 3 : Mengetahui cara pembuatan infografis yang baik

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Cara Pembuatan Infografis tahap 1 Google dan bar Oh lanjutkan -	20.45 udi
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Referensi dari Pakar Infografis Oh!	udi
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	penerapan / Komitmen Mutu. Oh -	udi
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Mendukung Visi Dunia Desiminasi, Penguatan kompetensi SDM	udi
Penguatan Nilai Organisasi	Profesional, Oh	udi

4) Kegiatan 4 : Pembimbingan pembuatan infografis

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Tahap pembimbingan pembuatan infografis berjalan baik Oh	idi
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Draft Infografis Oh	idi
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Komitmen Mutu No 5 Oh	idi
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Mendukung Pencerapaian Misi Organisasi	idi
Penguatan Nilai Organisasi	Akuntabel, Profesional, Oh	idi

- 5) Kegiatan 5 : Pembuatan infografis hasil penelitian bidang PDN yang telah ditentukan & laporan kepada Tim Koordinasi Penelitian

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Pembuatan Infografi PDN berjalan baik - Oh lanjut .	15'
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Draft awal to final - Oh	20'
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi mata Oh -	10'
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Mendukung visi & misi Duslit	20'
Penguatan Nilai Organisasi	Profesional, Akuntabel Integritas	10'

- 6) Kegiatan 6 : Pendiseminasian infografis hasil penelitian bidang PDN kepada komisi terkait dan melalui *website* Puslit

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Mendiseminasikan hasil penelitian dengan infografis dan Website Puslit	100%
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Hasil penelitian terdiseminasi dengan Infografis	100%
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Nilai dominan pada tahapan ini adalah Akuntabilitas	100%
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Mendukung visi & misi organisasi melalui keterandalan diseminasi	100%
Penguatan Nilai Organisasi	Profesional, Akuntabel, Integritas	100%



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Kode Pos 10270

Telepon: (021) 5715349; Fax: (021) 5715 432/925; Website: www.dpr.go.id

KEGIATAN 1

**“Mengumpulkan Hasil Penelitian Kelompok Bidang PDN
yang akan Diseminasikan”**

Waktu Pelaksanaan : Mei IV - Juni I

Tahapan Kegiatan : 1. Konsultasi dengan koordinator bidang;
2. Melakukan koordinasi dengan peneliti bidang PDN;
3. Mengumpulkan hasil penelitian kelompok di bidang PDN yang sudah selesai;
4. Mengidentifikasi latar belakang masalah, tujuan, hasil, dan rekomendasi penelitian

Output :

**LAPORAN POKOK-POKOK HASIL PENELITIAN KELOMPOK
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

PENELITIAN PDN TAHUN 2016

- a. **Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia** (Riris Katharina, Handrini Ardiyanti, Debora Sanur, Dewi Sendhikasari)

Penelitian berdasarkan UU no. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Latar belakang:

- International Finance Cooperation (IFC) tahun 2013: kemudahan berbisnis (Ranking Doing Business) di Indonesia peringkat 120 dari 180 negara
- Index Global Competitiveness Report (WEF) tahun 2014-2015: Indonesia peringkat 34 dari 144 negara
- Indeks Persepsi Korupsi tahun 2014: Indonesia peringkat 107 dari 175 negara
- Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Ombudsman RI) tahun 2015: 65,79% pemerintah kabupaten/kota berada di kategori merah

Tujuan penelitian: apa kendala yang dihadapi dalam implementasi UU Pelayanan Publik?

Lokasi Penelitian:

- Jogja: sampel kota yang sudah berumur lama (>10tahun), memiliki predikat baik (kategori hijau)
- Lombok Utara: sampel kota baru (<10tahun), memiliki predikat rendah (kategori merah), tetapi peringkat terbaik daerah otonom baru versi Kemendagri

Hasil penelitian:

1. Belum ada Perpres mengenai mekanisme ganti rugi
2. Penyelenggara pelayanan publik belum mematuhi standar pelayanan publik

3. Belum memiliki orientasi pada kepuasan masyarakat
4. Banyaknya institusi negara & pemerintah yang melakukan survey pelayanan publik, sehingga menghabiskan waktu
5. Implementasi pelayanan publik bergantung pada:
 - kepemimpinan yang melahirkan inovasi
 - anggaran
 - kepedulian masyarakat

Rekomendasi penelitian:

1. Mensahkan Perpres yang mengatur mekanisme ganti rugi
2. Peningkatan kewenangan pengawasan oleh DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten, & Kota
3. Inovasi pelayanan berbasis informasi teknologi yang *mobile*
4. Menunjuk KemenPAN&RB sebagai lembaga yang mensinergikan survey seluruh lembaga
5. Memberantas praktek pungli, pelayanan berbelit & lambat

b. Dinamika Pelaksanaan Persandian di Pemerintahan Daerah (Prayudi, Ahmad Budiman, Aryojati Ardipandanto)

Latar belakang

Berdasarkan pasal 18 UUD 1945, daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan urusan pemerintah pusat.

Persandian untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan daerah dalam menyandikan kebijakan yang menjadi kepentingan publik untuk kepentingan kekuasaan.

Tujuan penelitian: mendeskripsikan dinamika pelaksanaan persandian di pemerintahan daerah.

Kegunaan penelitian

- menelaah persoalan persandian dari perspektif politik pemerintah dan komunikasi organisasi
- memberikan dukungan keahlian kepada dewan terkait perumusan regulasi mengenai persandian

Lokasi penelitian:

- Jogja: tata pemerintahan telah maju dalam pengembangan *e-government*, kategori bagus dalam persandian (LAN)
- Sumatra Utara: daerah dengan dinamika sosial & politik yang tinggi dan beragam, termasuk kategori kurang baik dalam persandian (LAN)

Hasil penelitian:

1. Kewenangan pemerintah daerah sebanyak 90% merupakan pelayanan publik. Oleh karena itu kewenangan harus dijalan secara terbuka (transparan) dan akuntabel, sehingga mengurangi urgensi persandian.
2. Benturan sifat pengelolaan pemerintahan daerah: semakin tertutup sifat pengelolaan, semakin rendah akuntabilitas, & semakin otoriter.

3. Perlu pengharmonisasian dengan UU no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena:
 - persandian dinilai bertentangan dengan KIP
 - belum mampu mengklarifikasi kategori informasi
 - belum semua menetapkan PPID
 - belum ada unit/tupoksi aktivitas persandian
4. Pengelolaan informasi selama ini sebagai berikut:
 - menyimpan informasi di bawah kewenangannya dalam bentuk cetak & elektronik
 - menyediakan informasi di bawah kewenangannya dalam bentuk cetak & elektronik kepada intern, antar SKPD, dan publik
 - pengamanan informasi tercetak disimpan ke dalam lemari besi dan dilakukan rekap secara manual. Sedangkan informasi elektronik disimpan dalam server dengan pencegahan virus/hacker
5. Mekanisme persandian:
 - perintah awal dari kepala daerah atau inisiatif Kantor Santel terhadap informasi kategori rahasia
 - enkripsi terhadap informasi cetak/elektronik menggunakan alat persandian
 - hasil enkripsi berupa informasi sandi tercetak dan disimpan di lemari besi
 - proses temu kembali sandi tercetak menggunakan rekap manual
 - perlu ada keseriusan kepala daerah, terutama pemahaman terhadap kriteria informasi yang disandikan
6. Lemsaneg melakukan sertifikasi dan akreditasi terhadap tenaga serta alat persandian. Namun tenaga persandian masih terbatas
7. Urgensi persandian di daerah agar informasi pemerintahan tidak dikuasai pihak-pihak tertentu yang berafiliasi dengan partai
8. Persandian belum ditempatkan menjadi landasan pembentukan akuntabilitas pemerintahan

Rekomendasi penelitian:

1. Pemerintah daerah harus memiliki payung hukum yang tegas mengatur persandian kelembagaan
2. Mentransformasikan urusan persandian menjadi basis penguatan integrasi bangsa
3. Pembakuan mekanisme persandian dalam regulasi, yang terkait tugas & kewajiban, pengamanan persandian, dan koordinasi persandian antar institusi
4. Pengembangan kualitas SDM persandian

PENELITIAN PDN TAHUN 2017

- a. **Model Tata Kelola Dana Desa** (Riris Katharina, Debora Sanur, Dewi Sendhikasari)

Latar belakang:

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta

pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Perubahan pengaturan pendapatan desa

UU No. 32 Tahun 2004 & PP No. 72 Tahun 2005	UU No. 6 Tahun 2014
- Alokasi Dana Desa (ADD) 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi belanja pegawai - Jalur anggaran APBN hanya dalam bentuk bantuan langsung masyarakat	- Alokasi Dana Desa (ADD) 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus - Jalur anggaran APBN, besaran alokasi yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap - Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

Hasil penelitian:

Kendala pengelolaan dana desa:

- kinerja kabupaten kalah cepat dengan desa
- partisipasi masyarakat masih pasif di musyawarah desa
- tenaga pendamping kurang memadai dan berkapasitas
- jaringan internet kurang lancar
- benturan antara dana desa dan dana aspirasi
- masyarakat dan pemerintah belum memahami UU Desa dan turunannya

Rekomendasi Tata Kelola Dana Desa:

1. Perlu keteladanan kepemimpinan, yang visioner & misioner
2. Kepercayaan terhadap kekuasaan
3. Memenuhi substansi tata kelola:
 - kapasitas, yakni responsif, perencanaan & penganggaran baik, mobilisasi sumber daya lokal
 - efektivitas, yakni kesesuaian perencanaan & pelaksanaan, tepat sasaran
 - akuntabilitas, yakni dana desa dikelola secara otentik, transparan, bersih, dan bebas korupsi

Kesimpulan:

UU Desa hadir untuk mengangkat harkat martabat desa. Dana desa diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang bertanggung jawab, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

UU Desa harus dapat mendorong desa menjadi lembaga demokratisasi dan untuk kemandirian desa.

- b. **Tata Kelola Cyber Security pada Pemerintahan Daerah** (Prayudi, Ahmad Budiman, Aryojati Ardipandanto)

Latar belakang:

Perkembangan komunikasi media maya (*cyber*) harus berhadapan dengan potensi ancaman dalam pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaannya. Kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) antara lain pencurian identitas/data, pembajakan akun, penyebaran *malware & malicious code*, *fraud*, *spionase industry*, penyanderaan sumber daya informasi kritis, dan *cyberwarfare*.

Urgensi cyber security:

- antisipasi ancaman keamanan data dan informasi
- mendukung pengembangan *e-government*
- menjaga kepercayaan masyarakat dalam pelayanan publik berbasis online
- pemilu dan kampanye sangat rentan dipengaruhi konten media dan dinamika politiknya
- konten terkait suku, agama, dan ras berpotensi menyebabkan konflik masyarakat

Tujuan penelitian: mendeskripsikan tata kelola *cyber security* pada pemerintahan daerah.

Kegunaan penelitian:

- menelaah persoalan persoalan *cyber security* dari perspektif politik komunikasi dan politik pemerintahan
- memberikan dukungan keahlian kepada dewan terkait perumusan regulasi tentang *cyber security* dan penyelenggaraan pemilu.

Lokasi penelitian:

- Kalimantan Barat: tata pemerintahan cukup baik tapi masih berpotensi konflik
- Sulawesi Tenggara: daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan dinamika cukup kompleks dan menyalurkan lewat media sosial

Hasil penelitian:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika belum optimal bekerja.
2. Ketersediaan SDM yang berkompeten terbatas.
3. Keterbatasan anggaran, perangkat kerja, dan infrastruktur siber
4. Tata kelola keamanan siber terkait kepemiluan dilakukan terpusat
5. Syarat keamanan siber yang optimal: kebijakan, alat, perlindungan keamanan, pedoman, manajemen resiko, tindakan, pelatihan, jaminan teknologi
6. Sistem keamanan siber pada pelayanan publik dilakukan pada setiap informasi publik dan informasi yang dikecualikan untuk menjaga otentisitas
7. Kendala *cyber security* terhadap media sosial:
 - pengawasan dan pengendalian penggunaan medsos
 - pengawasan konten
8. Penggunaan medsos untuk kepentingan politik:
 - Sultra: penggunaan medsos lebih berkembang di masyarakat perkotaan, partai memiliki akun resmi yang terdaftar di KPU
 - Kalbar: medsos dipakai untuk menyebarkan isu yang menyerang pihak pesaing, tetapi Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menindak akun-akun yang diduga melakukan pelanggaran

9. Literasi masyarakat yang lemah dimanfaatkan partai untuk kemenangan pemilu
10. Kunci pengembangan *cyber security* di Sultra adalah menuntaskan infrastruktur *online* dan mempersiapkan SDM.
11. Pencegahan konflik di medsos oleh Pemda Sultra dengan bekerja sama dengan masyarakat penyeimbang, yaitu masyarakat yang melek politik dan dapat memberikan fakta yang benar untuk meredam informasi hoax atau provokasi
12. Kesadaran *cyber security* di Kalbar sudah lebih maju tetapi belum menyeluruh di Pemda. Pada Pemprov Kalbar belum dijadikan sebagai prioritas
13. Perpolitikan di Kalbar lebih eksis di medsos, oleh karena itu sangat rawan terprovokasi terutama terkait SARA. Pencegahan konflik terjadi di kalangan anak muda yang lebih waspada dengan berita-berita beredar di dunia maya.
14. Kelemahan medsos: berpotensi menimbulkan konflik karena berisi informasi yang vulgar atau hoax

Hasil penelitian:

1. Segera menata keamanan siber dengan:
 - menambah SDM berkompetensi
 - meningkatkan anggaran pembangunan sistem keamanan siber
 - menyediakan perangkat teknologi modern
 - membentuk peraturan sistem keamanan siber
2. Perlu dukungan sumber daya bagi penyelenggara pemilu untuk mengelola *cyber security* data kepemiluan. Koordinasi antara KPU dan Disdukcapil harus terkoneksi jaringan internet
3. Kapasitas SDM di KPU harus memahami teknologi informasi. UU no. 7 tahun 2017 sudah menekankan pentingnya perhatian pada media kampanye, termasuk di medsos
4. Partai perlu memperkuat basis data IT terhadap pengelolaan internal organisasi dan meningkatkan literasi politik masyarakat
5. *Political will* dapat menjadi penyeimbang terhadap konten hoax dan provokasi di medsos, serta pencerdasan masyarakat di daerah masing-masing. Pemda diharapkan segera mengembangkan sistem pemerintahan berbasis *online* dengan akselerasi penuh.

Jakarta, 8 Juni 2018

Mengetahui,
Mentor

Peserta Latsar CPNS,



Drs. Ahmad Budiman, M.Pd

NIP 19690422 199703 1 004



Siti Chaerani Dewanti, S.Ars, M.Si

NIP 19870429 201801 2 001

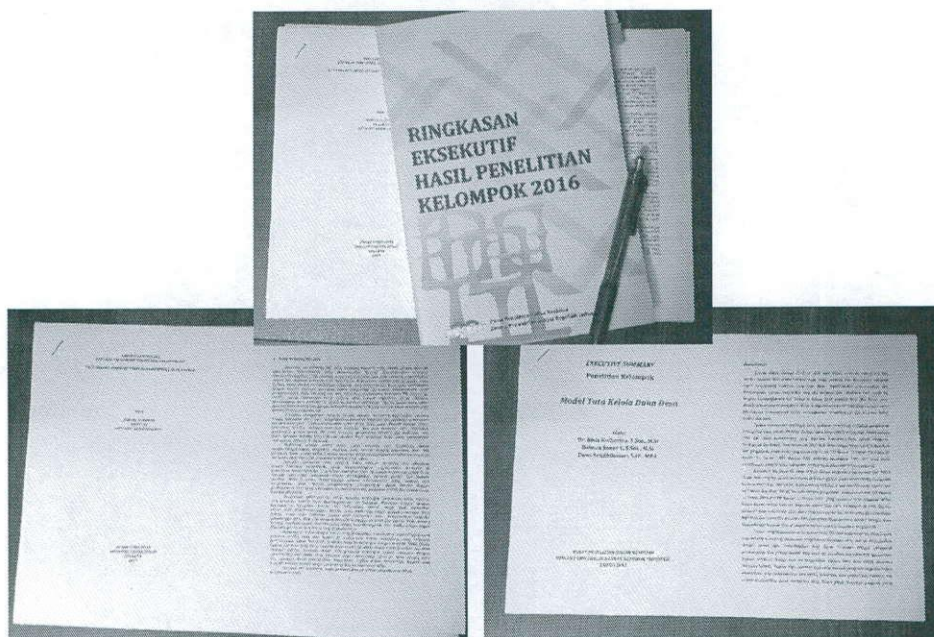
DOKUMENTASI AKTUALISASI KEGIATAN 1



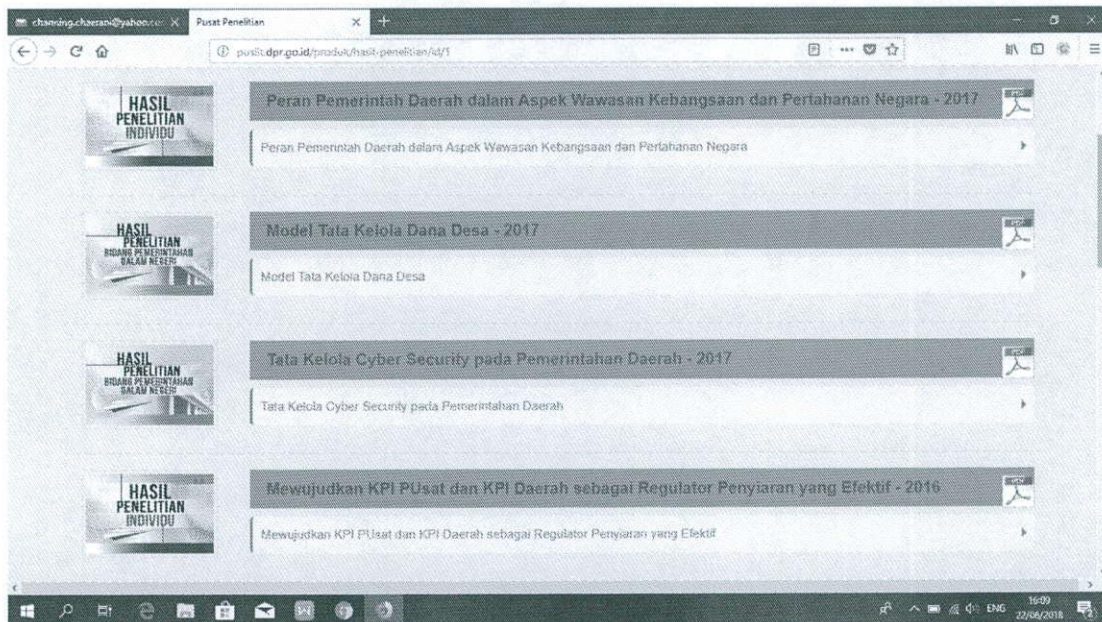
Konsultasi dengan Koordinator Bidang



Konsultasi dengan Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI



Laporan Hasil Penelitian Kelompok PDN tahun 2016-2017



Mengumpulkan Data Hasil Penelitian Kelompok Bidang PDN melalui *website*
(<http://puslit.dpr.go.id/produk/hasil-penelitian/id/1>)



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Kode Pos 10270
Telepon: (021) 5715349; Fax: (021) 5715 432/925; Website: www.dpr.go.id

KEGIATAN 2

“Melakukan Diskusi Terkait Hasil Penelitian Kelompok Bidang PDN”

Waktu Pelaksanaan : Juni IV - Juli I

Tahapan Kegiatan : 1. Konsultasi dengan koordinator bidang;
2. Membuat pedoman diskusi;
3. Menghubungi para peneliti senior (tim penelitian) untuk memohon waktu diskusi;
4. Berdiskusi dengan tim penelitian yang sudah menyelesaikan laporan hasil penelitiannya untuk memverifikasi temuan identifikasi di kegiatan 1

Output :

**LAPORAN SINGKAT KEGIATAN DISKUSI
HASIL PENELITIAN BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

1. Tahun 2016, bidang PDN melakukan dua penelitian kelompok. Kelompok 1 meneliti tentang dinamika persandian di daerah. Kelompok penelitian ini terdiri dari Bpk Prayudi, Bpk. Ahmad Budiman, dan Sdr. Aryojati. Sedangkan kelompok 2 meneliti tentang upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Kelompok ini terdiri dari Ibu Riris Katharina, Ibu Handrini, Ibu Debora, dan Ibu Dewi.
2. Tim persandian melakukan penelitian ke daerah Jogja dan Sumatera Utara. Sedangkan tim pelayanan publik melakukan penelitian ke Jogja dan Lombok.
3. Temuan penelitian kelompok persandian:
 - a) Terbatas SDM yang menjadi sandiman
 - b) Pola kerja berbeda-beda

Fokus masalah penelitian ada tiga aspek yaitu

1. Politik pemerintahan: kaitan persandian dengan transparansi, akuntabilitas
2. Komunikasi organisasi: tata kelola
3. Dampak kinerja politik pemerintah daerah

Narasumber penelitian antara lain kesbangpol, pemda, dinas pendidikan, DPRD, dinas perijinan terpadu, kampus, LSM, & media --> institusi yang pada hakikatnya memerlukan aktivitas persandian.

FGD dengan pakar disebutkan bahwa urgensi melakukan persandian bukan untuk kerahasiaan, tetapi untuk menjaga otensitas, terbukti pada waktu melakukan penelitian di sumatera utara.

Di daerah itu pada waktu penelitian baru saja terjadi OTT oleh KPK. Akibatnya orang di daerah penelitian takut menerima tim peneliti, karena dikira sebagai orang KPK, apalagi membahas tentang persandian.

Urgensi persandian dipahami oleh kepala daerah hanya dilihat dari aspek kerahasiaan saja, termasuk merahasiakan hal yang negatif.

Rekomendasi strategis dari penelitian:

- (pak budiman) perlu penataan yang lebih baik akan sistem pengelolaan sistem persandian di komunikasi organisasi pemda agar arti penting persandian bisa dimaksimalkan dan dilandasi oleh regulasi yang lengkap
- (pak prayudi) Persandian tetap mengedepankan aspek akuntabilitas, tidak menyampingkan azas transparansi.
- (mas aryo) persandian merupakan amanat dari undang-undang. Kinerja politik hakikatnya harus bisa dilaksanakan tapi harus berpegang pada regulasi, bukan pada keinginan atau kepentingan rezim yang berkuasa

Penelitian ini menggunakan 2 penjurur ilmu, yaitu ilmu politik & ilmu komunikasi. Dalam konteks ilmu politik, persandian erat kaitannya dengan integrasi bangsa. Pelaksanaannya harus akuntabel.

Temuan lainnya, belum ada standarisasi dan kesadaran yang lebih serius. Kalaupun ada, tetapi belum didukung. Faktor yang mempengaruhi adalah perlu komitmen dari kepala daerah untuk menangani persandian.

Ketiga, persandian dan SDM merupakan bagian dari pembangunan politik.

Contoh kasus, ada surat yang masih draf terkait mutasi jabatan, sudah beredar. Oleh karena itu penting memakai persandian, apalagi di era media sosial sekarang ini. Akibat beredarnya draf surat tersebut, menimbulkan protes dari yang bersangkutan.

Peralatan persandian masih terbatas dan tersentral atas perintah atau pengadaan dari LSN. Ketika alat diperlukan namun diminta LSN, maka terpaksa diserahkan (temuan di Medan).

Di DIY kabupaten/kotanya bisa lebih maju daripada provinsinya terkait persandian, karena sistem pengelolaannya lebih maju, peralatan memadai, & SDM sandiman memadai.

SDM yang menjadi sandiman lebih banyak yang sudah berumur, karena menjadi sandiman tidak mudah, mendapat pelatihan khusus, & harus dapat menyimpan rahasia.

4. Tata kelola cyber security dilakukan pada tahun 2017
5. Penelitian ini berangkat dari realita banyaknya masalah keamanan cyber yang terjadi di pemerintah daerah. Selain itu belum ada regulasi yang mengatur. Penelitian juga dilakukan untuk mengetahui apakah permasalahan cyber merupakan masalah yang khas/spesifik/lokal, atau persoalan pusat yang harus dikelola daerah.

Tiga masalah utama tim penelitian cyber:

- a. Penggunaan media sosial dalam aktivitas penyelenggaraan pemilu, fokus di KPUD dan Bawaslu.
- b. Sosial kemasyarakatan: melihat potensi konflik yang dihasilkan dari media sosial. Tata kelola keamanan cyber harus bisa mengjangkau potensi masalah yang mungkin timbul.
- c. Tata kelola cyber bagi pmda dalam upaya meningkatkan pelayan publik

Informan penelitian: penyelenggara pemilu (KPUD), bawaslu, pemerintahan daerah, DPRD, media massa, komisi informasi publik, dan akademisi

6. Hasil temuan penelitian tim cyber:

Temuan terkait medsos dengan kepemiluan. Regulasi sudah tersedia, medsos yang terdaftar yang boleh digunakan dan diawasi bawaslu. Di luar itu, KPU dan Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan, misalnya terdapat *black campaign* terhadap satu calon yang dilakukan di facebook bukan dari akun yang terdaftar, maka Bawaslu atau KPU tidak dapat menindaklanjuti.

Pelayanan publik merupakan hal terdepan bagi pemerintah daerah, keperluannya untuk memperlancar kerja, efektif, efisien, dan bebas korupsi. Data yang berada di cyber itu perlu diamankan, misal data tentang potensi daerah, dsb. Hal itu memerlukan sebuah cara.

Kalimantan barat menjadi daerah tujuan penelitian untuk melihat potensi konflik dayak dengan melayu. Pada saat itu terjadi konflik perang melalui FB, melalui kata-kataan, hingga menggerakkan massa.

Di Sulawesi Tenggara terkait dengan pasangan calon yang sudah menggunakan media sosial untuk perang kepentingan sendiri, pada akhirnya juga menjurus kepada materi-materi yang mengandung isu SARA.

Rekomendasi penelitian antara lain bagaimana akan digunakan terkait dengan penyelenggaraan pemilu, bagaimana menata cyber agar lebih maksimal dalam pelayanan publik, serta dapat mengeliminir potensi konflik.

Terkait penyelenggaraan pemilu, KPU dan Bawaslu memiliki keterbatasan, misal ada kemungkinan penyalahgunaan media sosial. Oleh karena itu perlu ada kerja sama dengan Kominfo. Selain itu, perlu juga ada pelaporan dari setiap perkembangan data pemilu, terutama untuk daerah yang agak susah dijangkau, misalnya untuk melaporkan perkembangan TPS, dsb. KPU Kalbar & Sultra sebenarnya memiliki keinginan besar untuk menggunakan media sosial dalam rangka mencegah persaingan, peningkatan partisipasi, sosialisasi, dll.

Definisi cyber pada penelitian ini tidak hanya pada peralatan, tetapi juga sistem, dan dampaknya.

Di Kalbar, trauma dari konflik etnis masih terbawa di media sosial. Kalau di sultra lebih banyak ke penyalahgunaan, korupsi, dll.

7. Pada dasarnya jika pemimpin memiliki komitmen pada cyber, dalam lingkup pelayanan publik, kesejahteraan sosial, maka dapat berjalan dengan baik, terbukti di Pontianak.
8. Penelitian 2016 tentang peningkatan kualitas pelayanan publik diawali dari keinginan untuk keingintahuan untuk melihat sudah sejauh mana pelayanan publik berhasil ditingkatkan melalui kebijakan pembentukan daerah otonom baru (DOB). Ternyata pelayanan publik di era DOB belum ada peningkatan.
9. Pemilihan tempat Jogja & Lombok. Jogja karena sebagai daerah otonom peraih penghargaan pelayanan publik terbaik versi Kemendagri. Lombok adalah daerah otonom yang baru terbentuk, peringkat DOB tinggi tetapi pelayanan publiknya rendah.
10. Temuan riset:
Untuk daerah yang otonomi nya sudah lama, pelayanan publik akan meningkat. Sedangkan yang daerah otonomi baru, belum mampu memberikan pelayanan publik sebagaimana yang diharapkan.

Nilai DOB tinggi, tetapi pelayanan publik karena penilaian pemeringkatan DOB hanya dilihat dari ketersediaan dokumen. Padahal ketersediaan dokumen lengkap bukan berarti pelayanan publiknya baik.

Kemendagri memiliki instrumen sendiri untuk menilai. Instrumen tersebut berbeda dengan instrumen yang digunakan Ombudsman, KPK, dll. Oleh karena itu ada banyak institusi yang melakukan survey, dengan instrumen berbeda.

Institusi yang diakui untuk memberikan penilaian adalah KemenPAN & Kemendagri. Agar lebih efektif lebih direkomendasikan kemenPAN untuk melakukan penilaian.

Instrumen hasil evaluasi KemenPANRB menggunakan LAKIP. Hampir semua menggunakan dokumen sebagai bahan evaluasi, kecuali ombudsman & KPK yang melihat capaian di lapangan. Kemendagri & KemenPAN tidak melihat langsung di lapangan kecuali di ibukota, karena keterbatasan akses.

UU pelayanan publik memerintahkan membentuk perpres mengenai mekanisme ganti rugi, tetapi sampai sekarang belum ada. Seharusnya masyarakat sebagai penerima pelayanan jika merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi. Dengan adanya perpres tersebut diharapkan efektif membuat jera si pemberi pelayanan.

Mengetahui,
Mentor

Jakarta, 6 Juli 2018
Peserta Latsar CPNS,



Drs. Ahmad Budiman, M.Pd
NIP 19690422 199703 1 004



Siti Chaerani Dewanti, S.Ars, M.Si
NIP 19870429 201801 2 001

DOKUMENTASI AKTUALISASI KEGIATAN 2





SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

28 Juni 2018

Nomor : **BK/10708/SETJEN-DPR RI/PP/06/2018**
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Hal : **Undangan Diskusi Hasil Penelitian Kelompok PDN**

Yth.

Kelompok Peneliti
Bidang Politik Dalam Negeri
di
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, sehubungan dengan agenda habituasi CPNS Peneliti, kami mengundang Saudara untuk melakukan diskusi hasil penelitian kelompok PDN tahun 2016 & 2017 yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 2 Juli 2018
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : R.R. Pusat Penelitian

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara untuk hadir pada acara dimaksud.

Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian,

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
NIP. 197111171998031004



KEGIATAN 3
“Mengetahui Cara Pembuatan Infografis yang Baik”

Waktu Pelaksanaan : Juli II - IV
Tahapan Kegiatan : 1. Konsultasi dengan koordinator bidang;
2. Mencari literatur / referensi infografis di perpustakaan
3. Mencari referensi infografis di website
4. Menghubungi narasumber yang berkompetensi di infografis untuk meminta kesediaan waktunya
5. Melakukan diskusi terbatas dengan narasumber yang berkompetensi di infografis
6. Melaporkan dan mendiskusikan hasil review dengan mentor
Output : Laporan singkat & kumpulan referensi infografis

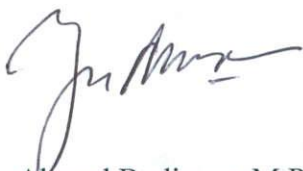
**LAPORAN SINGKAT KEGIATAN DISKUSI
PELATIHAN INFOGRAFIS**

1. Kegiatan pelatihan infografis dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018 di Ruang Rapat Kapuslit
2. Pembicara: Sabda Armandio (Manager Multimedia Tirto.id)
3. Infografis berisi info-info yang terpenting.
 - Ukuran infografis yang berbentuk digital mengutamakan tampilan layar handphone agar mudah dilihat secara mobile, yaitu 9x16. Berisi narasi/text (30%) dan gambar/ilustrasi (70%)
 - infografis berisi ringkasan tulisan, per chapter, dibuat dalam timeline/linimasa
 - membuat infografis juga perlu memperhatikan reader's behaviour. Infografis harus jelas ditujukan ke siapa
 - font minimal 30px agar mudah dibaca
4. Dalam menampilkan hasil penelitian supaya lebih mudah dibaca dan dipahami sebaiknya dapat menggunakan infografik; Infografik adalah sebuah ilustrasi teknis yang memuat data, visual dan narasi sehingga memudahkan pembaca dalam memahami dan membaca suatu informasi;
5. Infografis memuat hal dasar: data, visual, & narasi yang menciptakan 'engagement' emosi permisa.
6. Tujuan dari membuat infografik adalah membawa perubahan dari pembaca. Infografik sebagai media pemancing. Menekan upaya menggurui orang lain dengan menampilkan sisi yang menyenangkan sebelum diberikan konten yang agak berat. Tiga elemen tersebut menjadi bernilai apabila produk yg dihasilkan membawa perubahan;
7. Masalah yang sering terjadi dalam pembuatan infografik selama ini adalah memilih informasi penting yang akan ditampilkan karena tidak semua informasi dari penelitian dapat dimuat ke dalam infografis. Hal ini berkaitan dengan

keterbatasan ukuran media; Sehingga dalam infografik tidak menampilkan latar belakang masalah, tujuan yang merupakan sistematika sebuah penelitian. Dengan kata lain, tampilan dapat langsung ke informasi inti;

8. Penting memisahkan antara peneliti dengan hasil penelitiannya dan desainer sebagai pembuat infografik. Seperti halnya penulis dengan editor. Harus bisa membedakan filter sehingga infonya tidak terlalu banyak dan mempunyai value. Dipisahkan antara orang yang mengumpulkan data dengan pembuat infografik. Kemudian ada diskusi untuk finalisasi konten. Jika data terlalu panjang maka desainer bisa memotong isi dengan persetujuan peneliti;
9. Tampilan warna dalam infografik biasanya maksimum menggunakan 3 (tiga) warna. Apabila kelebihan warna maka kebanyakan audience akan malas membacanya. Tampilan modern kebanyakan menggunakan warna monokrom.
10. Website yang dapat membantu pembuatan infografis: color.adobe.com (untuk pemilihan warna); www.piktochart.com (free template & desain infografis untuk yang tidak memiliki kemampuan desain basic).
11. Contoh tampilan infografik dari data tentang sejarah maka tampilan bisa dibentuk menjadi timeline atau linimasa;
12. Beberapa yang tidak boleh dilakukan dalam pembuatan infografis adalah:
 - Menggunakan ulan desain orang lain tanpa izin;
 - Mencuri karya orang lain;
 - Menjatuhkan karya lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status
13. Informasi data yang ditampilkan dalam infografis juga harus jelas. Jika menggunakan dua sumber yg berbeda maka dua-duanya akan ditampilkan dalam satu infografik;
14. Apabila ada data pemerintah dan oposisi yang saling bertentangan maka bisa ditampilkan semua dan disertai sumber data. Jika membandingkan sebuah data maka tidak menyimpulkan atau mengarahkan data hanya menampilkan saja. Tetapi bisa diberikan rekomendasi.

Mengetahui,
Mentor



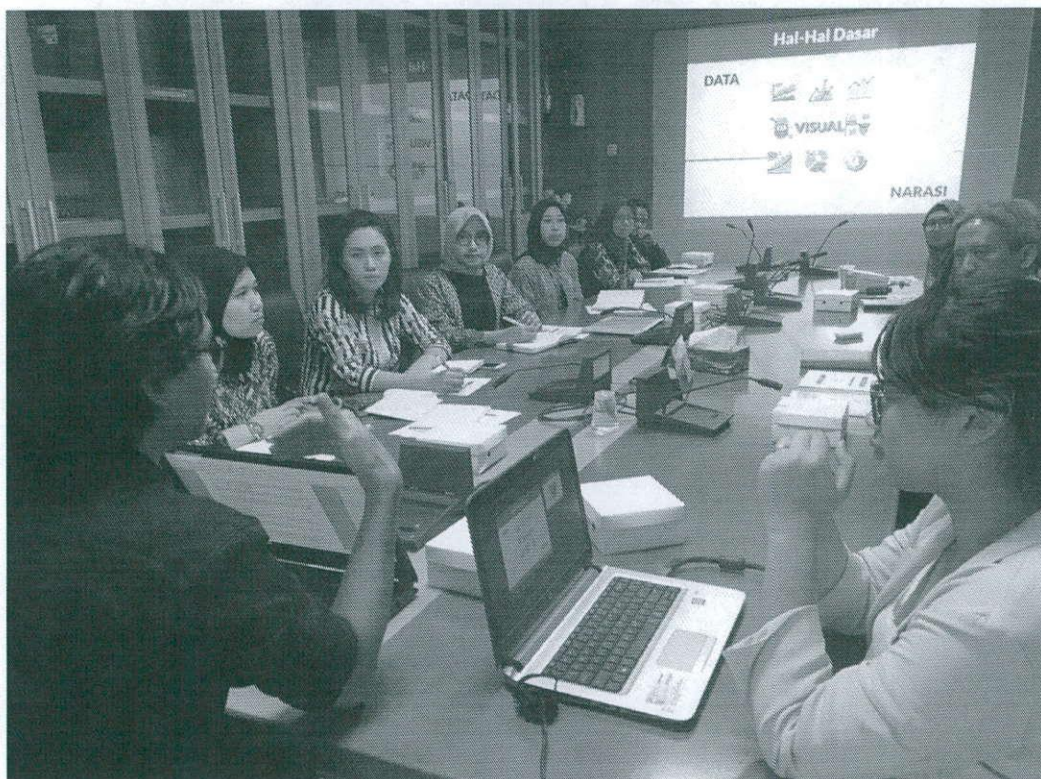
Drs. Ahmad Budiman, M.Pd
NIP 19690422 199703 1 004

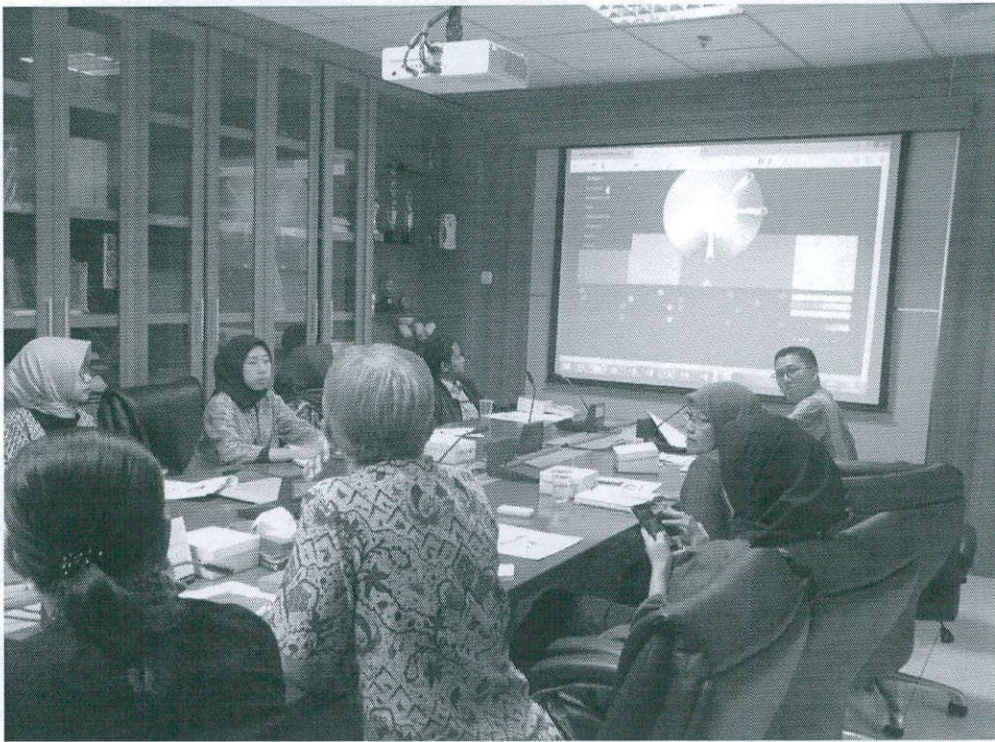
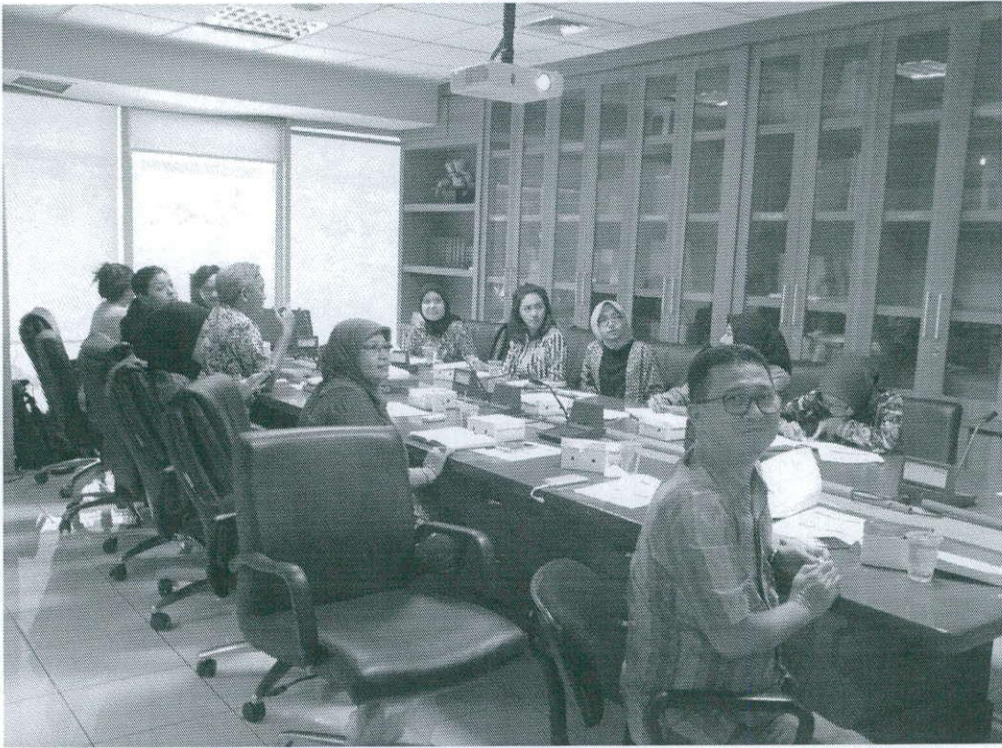
Jakarta, 6 Juli 2018
Peserta Latsar CPNS,



Siti Chaerani Dewanti, S.Ars, M.Si
NIP 19870429 201801 2 001

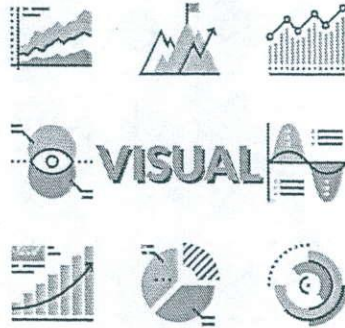
DOKUMENTASI AKTUALISASI KEGIATAN 3





Hal-Hal Dasar

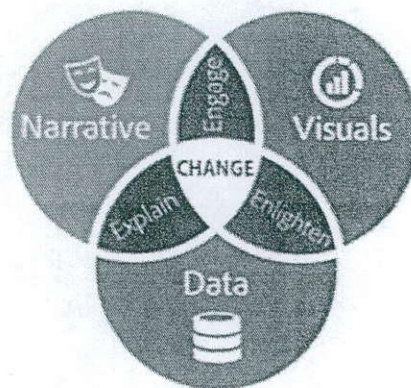
DATA



VISUAL

NARASI

Infografik yang Ideal



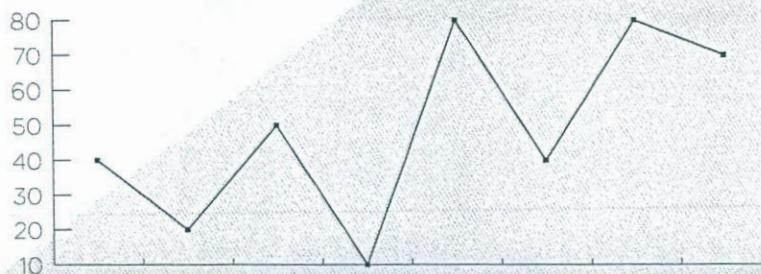
Fungsi Diagram

Mempermudah dalam memperinci data yang berisi angka. Digunakan untuk meringkas dan memperpendek informasi dalam setiap presentasi data atau hal lainnya.

Macam Diagram

Diagram Garis

Penyajian data statistik dengan memakai garis yang melakukan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan.



Macam Diagram

Diagram Lingkaran

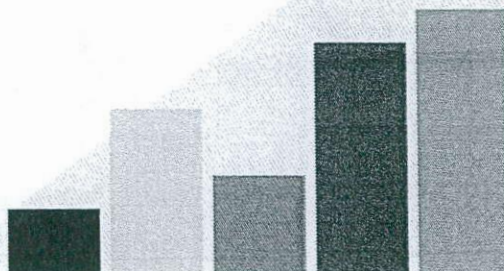
Penyajian data statistik dengan memakai gambar yang berbentuk lingkaran. Lingkaran tersebut dibagi dalam beberapa bagian yang menyatakan nilai dengan bentuk persen.



Macam Diagram

Diagram Batang

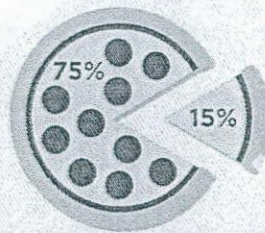
Menunjukkan bilangan atau kuantitas.



Macam Diagram yang Dipakai Tirto

Diagram Gambar

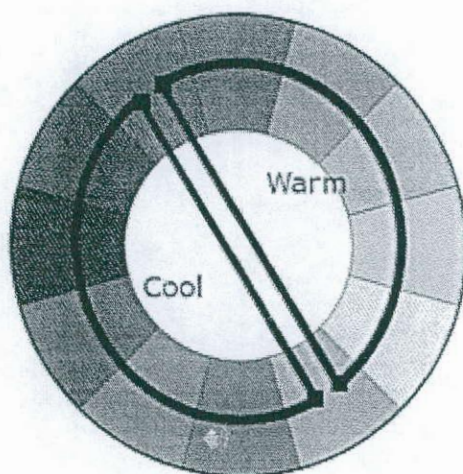
Piktogram adalah diagram di mana data disajikan dalam bentuk gambar atau lukisan untuk mewakili benda yang menampilkan banyak benda sesungguhnya.



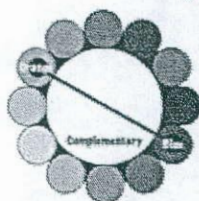
Apa yang diperlukan untuk menjadi desainer

- Memiliki kemampuan memecahkan masalah
- Menguasai Nirmana
- Pengetahuan warna
- Kepekaan warna, baik aditif (cahaya langsung) maupun subtraktif (pantulan/pigmen)
- Pengetahuan warna monitor (RGB)
- Keterampilan olah huruf
- Memiliki ketrampilan menggambar
- Memiliki pengetahuan dasar fotografi
- Menciptakan desain fungsional estetis, namun juga informatif dan komunikatif

Jenis Warna

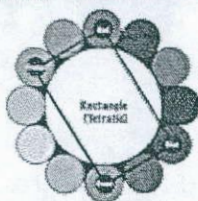


Color Schemes



Complementary color scheme
Colors that are opposite each other on the color wheel are considered to be complementary colors.

Example: Orange and Blue



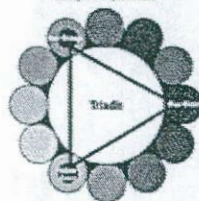
Rectangle (Tetradic) color scheme
The rectangle or tetradic color scheme uses four colors arranged into two complementary pairs.

Example: Orange, Red, Blue and Green



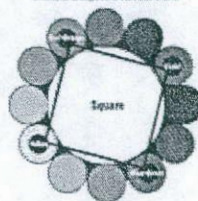
Analogous color scheme
Analogous color schemes are colors that are next to each other on the color wheel.

Example: Green, Blue-Green and Blue



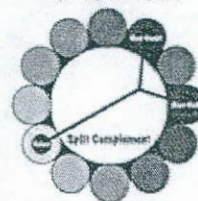
Triadic color scheme
A triadic color scheme uses colors that are evenly spaced around the color wheel.

Example: Yellow-Green, Red-Orange and Blue-Violet



Square color scheme
The square color scheme is similar to the rectangle, but with all four colors spaced evenly around the color wheel.

Example: Yellow, Red-Orange, Violet and Blue-Green



Split-Complementary color scheme
The split-complementary color scheme is a variation of the complementary color scheme. In addition to the base color, it uses the two colors adjacent to its complement.

Example: Yellow, Red-Violet and Blue-Violet

Layout

Judul

KONTEN

Simbol

Tipografi

Heading Font

SUB-HEADING GOES HERE

Loren ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Heading Font

SUB-HEADING GOES HERE

Loren ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Heading Font

SUB-HEADING GOES HERE

Loren ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Apa yang harus dimiliki

- Pemahaman tentang apa yang hendak diinformasikan
- Tahu untuk siapa karya yang dibuat, masyarakat pembaca seperti apa yang dituju
- Tahu respon seperti apa yang diharapkan setelah pembaca melihat karya Anda

Gagasan Segar

Manusia selalu menuntut hal baru untuk menghindari kebosanan, dalam era banjir informasi seperti saat ini, diharapkan desainer Tirto memiliki gagasan-gagasan baru

Apa yang tidak boleh dilakukan?

- Tidak boleh menggunakan ulang desain orang lain tanpa izin
- Tidak boleh mencuri karya orang lain
- Tidak boleh menjatuhkan karya desain lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status

Materi Magang Multimedia

Situs Pilkada Tirto

Situs ini merupakan media yang memuat liputan khusus Pilkada DKI, diwartakan dalam bentuk tulisan, video, foto, peta kampanye, dan infografik. Sehingga, selain membaca, para pembaca juga dapat melihat ilustrasi informasi yang telah dipepatkan ke dalam infografik serta video ringkas yang diharapkan akan menambah keakuratan suatu berita.

Infografik

Infografik ala Tirto bukan semata-mata tampilan grafis statistik dan angka. Ia juga bisa berupa ilustrasi teknis hingga isotype, sehingga memungkinkan desainer mengeksplorasi gagasan visualnya sejauh mungkin. Selama sumbernya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, juga patuh pada kode etik jurnalistik dan tidak abai pada kejelasan informasi, desainer Tirto sangat boleh membuat apa saja di atas kanvas.

Fungsi Diagram

Mempermudah dalam memperinci data yang berisi angka. Digunakan untuk meringkas dan memperpendek informasi dalam setiap presentasi data atau hal lainnya.

Macam Diagram yang Dipakai Tirto

② Diagram Garis

Penyajian data statistik dengan memakai garis yang melakukan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Sumbu X menunjukkan waktu pengamatan dan sumbu Y menunjukkan nilai-nilai data pengamatan untuk waktu tertentu. Gabungan waktu dan pengamatan membentuk titik XY.

② Diagram Lingkaran

Penyajian data statistik dengan memakai gambar yang berbentuk lingkaran. Lingkaran tersebut dibagi dalam beberapa bagian yang menyatakan nilai dengan bentuk persen.

② Diagram Batang

Menunjukkan bilangan atau kuantitas. Pada umumnya diagram batang menggambarkan perkembangan nilai-nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Diagram batang menunjukkan batang-batang tegak, mendatar, dan sama lebar dengan batang-batang terpisah.

② Diagram Gambar

Piktogram adalah diagram di mana data disajikan dalam bentuk gambar atau lukisan untuk mewakili benda yang menampilkan banyak benda sesungguhnya.

Apa yang diperlukan untuk menjadi desainer Tirto?

- ② Memiliki kemampuan memecahkan masalah
- ② Menguasai Nirmana. Kepekaan unsur rupa, seperti: Garis, bidang, bentuk, tekstur, kontras, ruang, irama, warna, dsb.
- ② Pengetahuan warna: Lingkaran warna, intensitas, analog, saturasi, kromatik, dsb.
- ② Kepekaan warna, baik aditif (cahaya langsung) maupun subtraktif (pantulan/pigmen)
- ② Pengetahuan warna monitor (RGB)
- ② Keterampilan olah huruf: Keluarga huruf, ukuran huruf, bobot huruf

- ❑ Memiliki ketrampilan menggambar dan kepekaan pada unsur gambar: Garis, bidang, warna, dsb.
- ❑ Memiliki pengetahuan dasar fotografi
- ❑ Menciptakan desain fungsional estetik, namun juga informatif dan komunikatif

Kelihaian Membaca Berita dan Peka Isu

Desainer Tirto dituntut untuk memahami isu terkini dan berpengetahuan luas, sehingga karya yang dihasilkan bukan cuma menjadi sampah seperti *banner* Judi Bola Online. Keahlian melihat celah untuk menyelipkan humor yang akhirnya membuat grafis yang mumet menjadi ringan dan enak dibaca mustahil bisa lahir jika seorang desainer tidak memiliki pengetahuan atas isu yang terjadi. Improvisasi sangat perlu, karena itulah yang akan menjadi nilai tawar sehingga karya desainer Tirto tidak dilupakan.

Apa yang harus dimiliki desainer Tirto

- ❑ Pemahaman tentang apa yang hendak diinformasikan
- ❑ Tahu untuk siapa karya yang dibuat, masyarakat pembaca seperti apa yang dituju
- ❑ Tahu respon seperti apa yang diharapkan setelah pembaca melihat karya Anda

Gagasan Segar

Manusia selalu menuntut hal baru untuk menghindari kebosanan, dalam era banjir informasi seperti saat ini, diharapkan desainer Tirto memiliki gagasan-gagasan baru. Kami sangat terbuka dengan ide baru, selama disampaikan dengan argumentasi kuat kami tak segan untuk mengikuti gagasan Anda.

Apa yang tidak boleh dilakukan?

- ❑ Tidak boleh menggunakan ulang desain orang lain tanpa izin
- ❑ Tidak boleh mencuri karya orang lain.
- ❑ Tidak boleh menjatuhkan karya desain lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status

Regulasi Penempatan Logo

- ❑ Logo Tirto (trapesium) selalu ada di sudut kanan atas
- ❑ Logo harus menjadi satu kesatuan dan tidak boleh terpisahkan
- ❑ Logo trapesium berwarna biru digunakan pada background putih atau terang dengan warna yang tidak sama dengan warna logo
- ❑ Logo trapesium berwarna putih digunakan pada background yang warnanya berseberangan dengan putih

Larangan Logo

- ❑ Tidak diizinkan merotasi logo tanpa persetujuan pihak Tirto
- ❑ Dilarang mengubah logo menjadi format outline
- ❑ Dilarang mendistorsi logo
- ❑ Dilarang memberi efek pada logo
- ❑ Dilarang menggunakan tipe huruf yang berbeda
- ❑ Dilarang menambah elemen lain pada logo
- ❑ Dilarang mengurangi elemen logo
- ❑ Dilarang mengubah warna huruf pada logotype

Font Gotham Family
Gotham Ultra
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Gotham Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Gotham Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Gotham Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Gotham Book
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Gotham Extra Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Gotham Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Gotham Thin
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat, 13 Juli 2018
Waktu : Pukul 09.00 Wib - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kepala Pusat Penelitian
Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat
Acara : Diskusi Internal Bidang Politik Dalam Negeri tentang : Optimalisasi Diseminasi Hasil Penelitian Melalui Infografis.

NO.	NAMA	INSTANSI/BIDANG	PARAF
1.	Ahmadudin	PDW	A.
2.	Siti Chaerani. D	PDN	chaerani
3.	Aulia Fitri	PDN	Fitri
4.	Nur Sholihah Putri Suni	KS	Sholihah
5.	Masyithah A. Adhiem	ERP	adhiem
6.	Fieka Nurul A.	KS	Fieka
7.	Aryojati Ardipandanto	PDN	Aryojati
8.	Mandana Hanif	ERP	Mandana
9.	Hanin Rostomyan	KS	Hanin
10.	DINA MARTIANY	KS	Dina
11.	DEBORA SAMPUR L.	PDN	debora
12.	Farida Alamyah	KS	Farida
13.	Dewi Sendhilasari D	PDW	Dewi
14.			
15.			

Kepala Pusat Penelitian,

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si
NIP. 19711117 199803 1 004



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

9 Juli 2018

Nomor : **BK/11315/SETJEN-DPR RI/PP/07/2018**
Sifat : **Penting**
Hal : **Undangan Pelatihan Infografis**

Yth.

Para Peneliti Pusat Penelitian

Badan Keahlian DPR RI

Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diadakannya Diskusi Internal Bidang Politik Dalam Negeri yang bertemakan "Optimalisasi Diseminasi Hasil Penelitian Melalui Infografis", maka kami mengundang Bapak/Ibu Peneliti untuk dapat menghadiri kegiatan Pelatihan Infografis, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 13 Juli 2018

Waktu : 09.00 - Selesai

Tempat : R. Rapat Pusat Penelitian Gedung Nusantara I Lt. 2,

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian

Dr. Indra Pahlevi, M.Si

NIP 197111171998031004



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

9 Juli 2018

Nomor : **BK/11314/SETJEN-DPR RI/PP/07/2018**
Sifat : **Penting**
Hal : **Undangan Pelatihan Infografis**

Yth.

Sabda Armandio

Manager Multimedia Tirto.id

Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diadakannya Diskusi Internal Bidang Politik Dalam Negeri yang bertemakan "Optimalisasi Diseminasi Hasil Penelitian Melalui Infografis", maka kami mengundang Bapak untuk dapat menjadi pembicara dalam kegiatan Pelatihan Infografis, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 13 Juli 2018

Waktu : 09.00 - Selesai

Tempat : R. Rapat Pusat Penelitian Gedung Nusantara I Lt. 2,
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Lakhar Kepala Badan Keahlian DPR RI



Rudi Rochmansyah, S.H. M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

the Power of Infographics

Using pictures to
communicate and
connect with
your audiences

Foreword by Guy Kawasaki, author of *Enchantment*
and former chief evangelist of Apple

que

Mark Smiciklas



Infographics 101

1

If you've read a newspaper or blog, flipped through a magazine, or used social media recently, you've likely come across infographics—those self-contained pictorials that tell you the gist of a story or concept at a glance.

But what is their purpose? Are infographics simply eye candy that publishers and brand journalists use to gloss up their content, or do they aim to fulfill a greater business communication objective?

WHAT ARE INFOGRAPHICS?

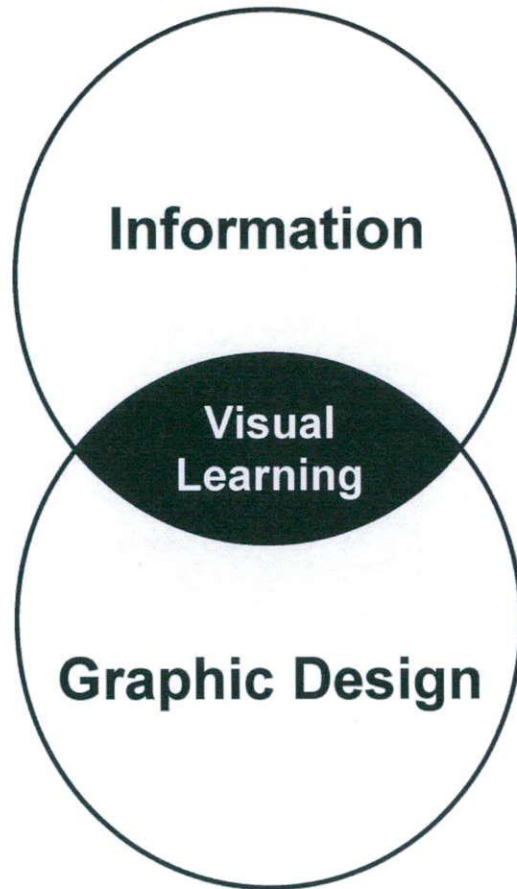
You've probably heard the phrase "A picture is worth a thousand words," a manifesto that speaks to the value and efficiency of visual communication.

An infographic (short for information graphic) is a type of picture that blends data with design, helping individuals and organizations concisely communicate messages to their audience (see Figure 1.1).

INFOGRAPHICS DEFINED

More formally, an infographic is defined as *a visualization of data or ideas that tries to convey complex information to an audience in a manner that can be quickly consumed and easily understood.*

The process of developing and publishing infographics is called data visualization, information design, or information architecture.



© Mark Smiciklas, Digital Strategist, IntersectionConsulting.com

FIGURE 1.1 Anatomy of an infographic.

Infographics combine data with design to enable visual learning. This communication process helps deliver complex information in a way that is more quickly and easily understood.

From a business perspective, one definition of infographics resonates above the rest. British graphic designer, author, and information design theorist Nigel Holmes simply refers to them as “explanation graphics.”

As a marketer, business owner, or manager, you can boil down your communication goals to explaining things to your audience. Infographics can help you communicate the following:

- Thought leadership and product features and benefits to your prospects
- Business process and service options to your customers
- Ideas and policies to your staff
- Corporate philosophy and strategy to your investors

Infographics can help your organization more effectively explain important information to your internal and external stakeholders.

Business Uses

Now that you have a basic understanding of what infographics are, what are some ways you can implement them into your business communication mix?

First, it’s important to understand that infographics are not used solely for external communication. They are a great medium for delivering marketing messages or insights to consumers and prospects, but they are equally effective when used to enhance internal communication.

Before you figure out how you can start using infographics, it helps to understand the nature of the information you are trying to communicate.

Business information can be divided into the following groups:

- **Statistics**—metrics such as sales, revenue, market research, surveys
- **Process**—manufacturing, customer service, sales funnel, lead generation, supply chain
- **Ideas**—concepts, theories, thought leadership, ideology
- **Chronology**—history, order of events, timelines, schedules
- **Geography**—locations, metrics by region
- **Anatomy**—ingredients, components, lists
- **Hierarchy**—organizational structure, needs assessment
- **Relationships**—internal, external, people, products/services
- **Personality**—brand humanization, organizational culture

Many people are familiar with statistics being represented as infographics because of the popularity of data visualization and its use in traditional media. However, business owners, marketers, and managers tend to overlook the use of infographics to communicate other types of information.

The next section delves into information categories in more detail. You will begin to see how infographics can effectively represent different types of business data and how they can become a powerful part of your organization's communication strategy.

INFOGRAPHIC HISTORY

Today, infographics can be used by a wide variety of individuals and organizations to enhance their communication. "Solopreneurs," small businesses, nonprofits, and large corporations can all find ways to use infographics to make their information more interesting and accessible to their target audiences.

You can find infographics published in traditional media such as newspapers and magazines and across digital channels, where social media has helped fuel an explosion in their popularity.

To the casual observer, it would appear that infographics are a recent phenomenon that has been growing in conjunction with the growth of the Internet. The reality is that we have been using icons, graphics, and pictures throughout history to tell stories, share information, and build knowledge, as shown in Figure 1.2.

As we entered the new millennium the publishing of infographics became more democratized, and their use began to extend beyond academia and traditional media channels.

Today, in an era of information overload and shortened attention spans, organizations of all sizes are using infographics to quickly deliver information and understanding to internal and external audiences. Add the fact that social media fuels "shareability," and everything points to infographics becoming one of the most effective forms of content for communicating information in the digital age. (Shareability is explained in greater detail later in this chapter.)

THE SCIENCE OF VISUALIZATION

Brain research related to the physiology of sight and the ways in which we process information using our eyes presents compelling rationale for considering the use of infographics in your business communication mix.

HARDWIRING

Vision is a huge part of the physical brain. Approximately 50% of the brain is dedicated (directly or indirectly) to visual functions.¹

The network of cells, neurons, and fibers that hosts all this activity is truly expansive. Within the eye, the retina alone is made up of more than 150 million cells and is actually a physical extension of the brain. In addition, neurons that are responsible for visual activity take up a large portion of the brain's real estate, representing approximately 30% of our total gray matter. To put this in perspective, neurons for touch and hearing make up only 8% and 3%, respectively.²

EASY ON THE MIND

With all this visual "hardwiring" in place, it makes sense that it would be less complicated for the brain to process infographics than pure text.

Each letter in a word is essentially a symbol. To read text, the brain needs to act as a decoder first, matching those letters with shapes stored in memory. From there the brain must figure out how all the letters fit together to form words, how words form sentences, and how sentences form paragraphs. Although all this comprehension takes place in only a split second, relatively speaking, when compared to how the brain deals with images, the process requires considerably more mental effort.³

One of the reasons we can process images faster than text is because of how the brain handles information. It processes data from pictures all at once but processes text in a linear manner, as shown in Figure 1.3.

So, in a way, by using infographics to communicate, you make it physically easier for your audience to relate and connect to your information.

In a TED talk about the beauty of data visualization, writer and designer David McCandless expands on the idea that infographics provide a sense of relief in a landscape filled with a mind-numbing amount of information:

"There's something almost quite magical about visual information. It's effortless. It literally pours in. If you're navigating a dense information jungle, coming across a beautiful graphic or lovely data visualization is a relief. It's like coming across a clearing in the jungle."⁴

3,000 BC

Good examples of early infographics are **Egyptian hieroglyphics** which formed language through the use of graphic symbols and icons.

**1510**

Leonardo da Vinci blended written instruction with illustrations to create a comprehensive guide on human anatomy.

**30,000 BC**

The first examples of infographics date back to the **Late Stone Age** when our ancestors began painting animal portraits on cave walls in the south of France.

**1350**

Medieval French philosopher **Nicole d'Orseme** created one of the first graphs in order to help explain how to measure a moving object.

**1786**

Scottish engineer **William Playfair** pioneered data visualization. His book "The Commercial and Political Atlas and Statistical Breviary" was the first to explain numeric data through the use of linear graphs, pie charts and bar graphs.

1857

English nurse **Florence Nightingale** combined stacked bar/ pie charts (Coxcomb chart) to illustrate the monthly number of casualties and causes of death explain during the Crimean War. She used these infographics to help convince Queen Victoria to improve conditions in military hospitals.

**1850-1870**

Charles Joseph Minard, a Civil Engineer from France, began combining maps with flow charts in order to explain geographical statistics. One of his most famous data visualizations illustrated the causes of Napoleon's failed attempt to invade Russia. He captured a complex data set for the period (map location, direction travelled, decline in troops and temperature) in a single infographic.

**1930-1940**

The modern era ushered in Isotype, a visual communication model developed by **Otto Neurath** to teach ideas and concepts through the use of icons and pictures.



Source: Wikipedia.com

© Mark Smiciklas, Digital Strategist, IntersectionConsulting.com

FIGURE 1.2

A brief history of infographics.

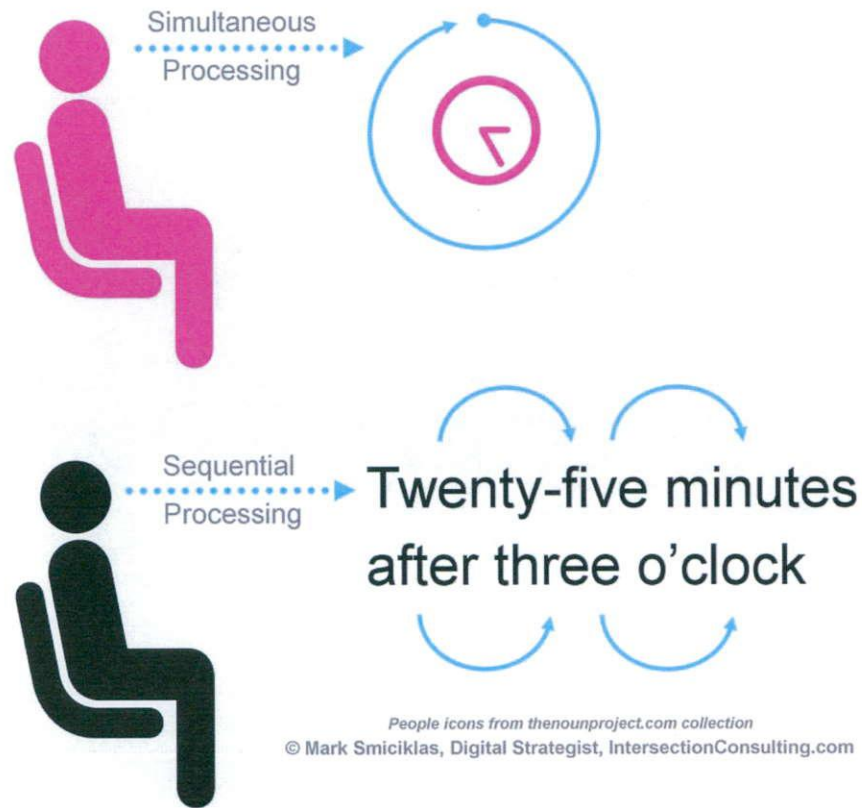


FIGURE 1.3

Visual learning.

Novelty

The brain is designed to seek out things that are different.

Think of the mind as a computer hard drive. For the brain to remain nimble and operate efficiently, its memory can't get filled up. To maintain an optimal processing speed, the brain filters incoming data and ends up discarding 99% of all sensory information almost immediately after perceiving it. One key component of this filtering process is assessing whether the incoming information is different from what the brain is accustomed to seeing. Information that is in some way novel or unusual attracts the brain's attention.⁵

Infographics provide an opportunity for your organization to add that element of novelty or uniqueness to your information and make it more noticeable to your audience.

VISUAL LEARNING

Based on the VARK⁶ model, people use four primary learning styles to process information:

- **Visual**—People learn by viewing graphic formats such as charts, maps, and diagrams instead of words.
- **Auditory**—People learn by listening to spoken words.
- **Read/write**—People learn by reading or writing words.
- **Kinesthetic**—People learn through experience (by doing).

Organizations using infographics to communicate their ideas and information have an opportunity to bridge the knowledge gap with their audiences. Infographics can improve the level at which customers and prospects engage with their marketing content. In addition, visualizing information can improve learning among employees and other internal stakeholders.

Some of the learning benefits associated with infographics include the following:

- Improved comprehension of information, ideas, and concepts
- Enhanced ability to think critically and develop and organize ideas
- Improved retention and recall of information⁷

Because it's estimated that visual learners represent approximately 65% of the population,⁸ it makes practical business sense to begin incorporating infographics into your organization's content strategy.

WHY INFOGRAPHICS WORK FOR BUSINESS

It is evident from the preceding section that our brains are “wired” for visual communication. But how does the scientific rationale for using infographics translate to the world of business?

There is no doubt that our attention spans are becoming more compressed as technology and digital media become more prevalent in our personal and professional lives. In the age of information overload, data crashes over us like a tidal wave (see Figure 1.4). There are a number of dynamics at play that help make a business case for the use of infographics in your marketing, content strategy, or communication mix.

EASY TO DIGEST

Your audiences are consuming more and more of their information online, so it’s important to understand how the process of interacting with digital data differs from that of print.

In general, we tend to read much slower off a screen than we do from more tactile media such as books and magazines. The reality is we have become scanners and skimmers of content.

Over the last two decades, renowned web usability expert Jakob Nielsen has been researching how users interact with the web. One thing he discovered is just how little we actually like to read online, establishing that the average person will read about 20% of the words on a regular web page.⁹

The information age has also sparked a change in how your audience processes information and navigates the web. One behavior pattern that has developed is Continuous Partial Attention,¹⁰ in which web users are simultaneously connected to multiple digital channels in order to maximize their access to information. The end result is increased exposure to content but at a more superficial level, creating slivers of attention (see Figure 1.5).

One of the by-products of this new online reality is the “attention economy,” the idea that a consumer’s attention to information has become a form of currency. A user becomes aware of your content, invests an amount of mental energy consuming that information, and then decides whether to engage further.¹¹

Social media strategy consultant, speaker, and author Jay Baer believes that technology is shaping the evolution of communication in this era of fractured attention spans.

“To a large degree, technology dictates how we communicate,” says Baer. “Time wasn’t an issue in the days when we used scrolls and long-form writing to share information.”

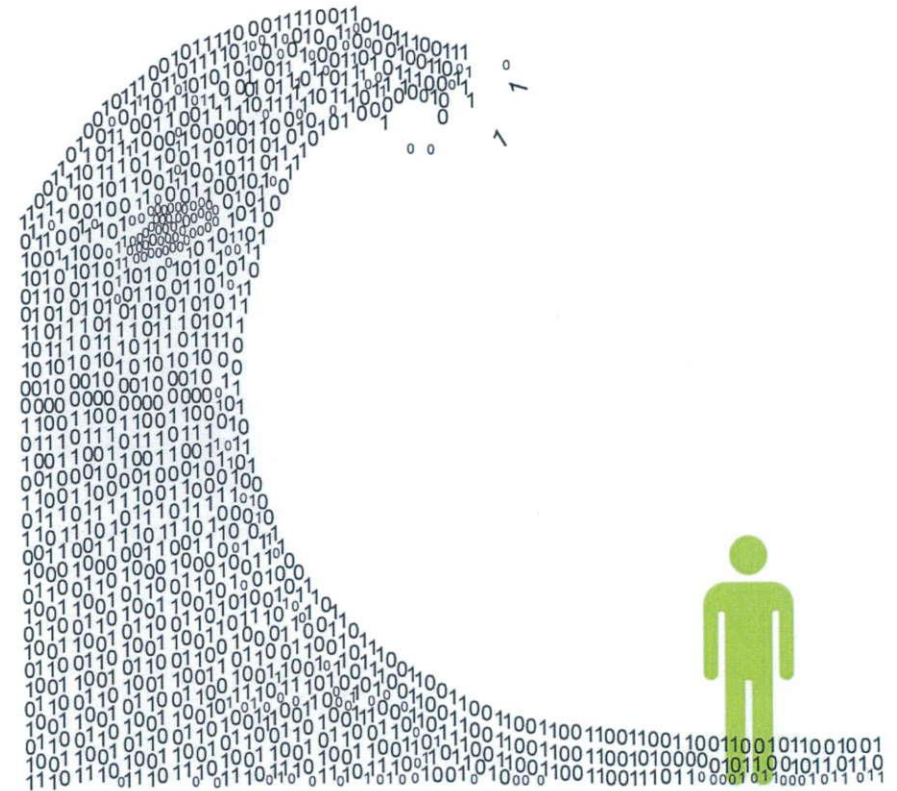
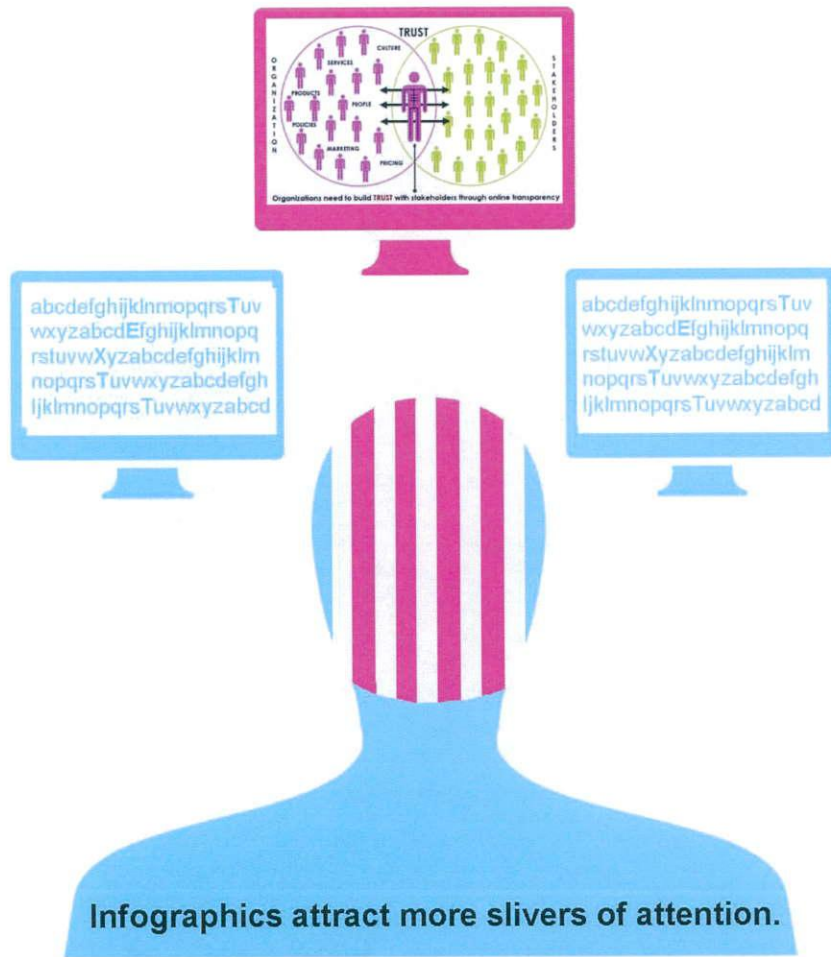


FIGURE 1.4 Information tidal wave.

In an era of data overload, infographics offer your audience information in a format that is easy to consume and share.



Computer icon from thenounproject.com collection

© Mark Smiciklas, Digital Strategist, IntersectionConsulting.com

FIGURE 1.5 Slivers of attention.

As we continue to gain access to vast volumes of information, our attention spans are becoming more fractured. Because the brain seeks out and notices things that are different, it can be easier to attract more slivers of your audience's attention by communicating your information visually.

Baer goes on to say that infographics fit very well into the "140-character" world: "As we become more pressed for time, concise, crystallized communication has become more important."

In an era where time is at a premium and attention is becoming a precious commodity, your audience is looking for nuggets of information. Infographics serve that need by presenting knowledge in an easy-to-digest format.

SHAREABILITY

Another important online communication dynamic is "word of mouse"—the ability of your information to spread digitally from person to person.

You don't need to be a programmer to embed sharing functionality on digital channels. Sharing toolbars and widgets are very accessible to content creators and are becoming commonplace on websites, blogs, and social networks.

When it comes to sharing content, the challenge is less technological than it is behavioral.

Many people are not comfortable sharing a link to an article, blog post, or web page unless they've had the chance to read it. A lot of content is shared across business networks, and many professionals want to make sure that information is relevant to their audience and congruent with their opinions and beliefs before they share it. Being pressed for time, many people don't necessarily have the luxury of reading lengthy amounts of text. As a result, they are less likely to share certain types of content.

Jason Falls, CEO of Social Media Explorer LLC, thinks that infographics have an inherently low barrier when it comes to sharing. "With infographics, you're not asking people to spend ten minutes reading eight hundred words of text," says Falls. "If you've got the key point of your message summed up in an attractive infographic, your audience can glance at it and get it... that's faster." He goes on to say that infographics are shared because "they are easy to comprehend and don't take up much of people's time. If infographics communicate something useful, there is a strong likelihood that people will share them with their networks."

Falls also feels that there is a reluctance to share long-form content. "These days, I think people are more hesitant when it comes to sharing lengthy blog posts or videos," he says. "If you've got an infographic that literally takes 20 seconds or so to scroll and scan, it becomes quick and easy to study and makes it much more shareable."¹²

A well-placed, self-contained infographic addresses our need to be confident about the content we're sharing. Infographics relay the gist of your information quickly, increasing the chance for it to be shared and fueling its spread across a wide variety of digital channels.

THE “COOL” FACTOR

Aesthetics are another reason that well-designed infographics are an effective communication tool. Simply put, infographics are different—and cool to look at, as in Figure 1.6!

Competition for your audience's attention is fierce. The average person is exposed to the equivalent of 174 newspapers full of information every day.¹³ As a result, the person your brand is trying to connect with probably spends only a few seconds on your content before deciding whether to move on to the next post, site, or network. Differentiating your organization, brand, or ideas is critical.

That fact that infographics are unique allows organizations an opportunity to make the content they are publishing stand out and get noticed.

ENDNOTES

1. MIT website, “MIT Research - Brain Processing of Visual Information,” <http://bit.ly/smlcH0>
2. Denise Grady, “The Vision Thing: Mainly in the Brain,” *Discover* magazine, <http://bit.ly/upYVBr>
3. Robert Lane and Dr. Stephen Kosslyn, “Show Me! What Brain Research Says About Visuals in PowerPoint,” Microsoft website, <http://bitly.com/s3lseP>
4. David McCandless, “The Beauty of Data Visualization,” TED website, <http://bit.ly/sHXvKc>
5. Patricia Wolfe, *Brain Matters: Translating Research into Classroom Practice*, Association for Supervision & Curriculum Development, 2001.
6. ARK website, “The VARK Categories,” <http://bitly.com/sm09ln>
7. Inspiration Software Inc. website, “Graphic Organizers: A Review of Scientifically Based Research,” <http://bit.ly/sfVLNS>
8. University of Michigan website, “Design for Adult Learning, Teaching and Learning Theory, Feedback,” <http://bitly.com/rv9iqZ>
9. Jakob Nielsen's Alertbox, “How Little Do Users Read?,” <http://bit.ly/vdDmsa>
10. Linda Stone, “Beyond Simple Multi-Tasking: Continuous Partial Attention,” <http://bit.ly/rtz09z>
11. Thomas Davenport and John Beck, *The Attention Economy: Understanding the New Currency of Business*. Harvard Business Review Press, 2002.
12. Jason Falls, interview by author, November 2011.
13. Richard Alleyne, “Welcome to the Information Age—174 Newspapers a Day,” *The Telegraph*, <http://tgr.ph/vtsr2e>

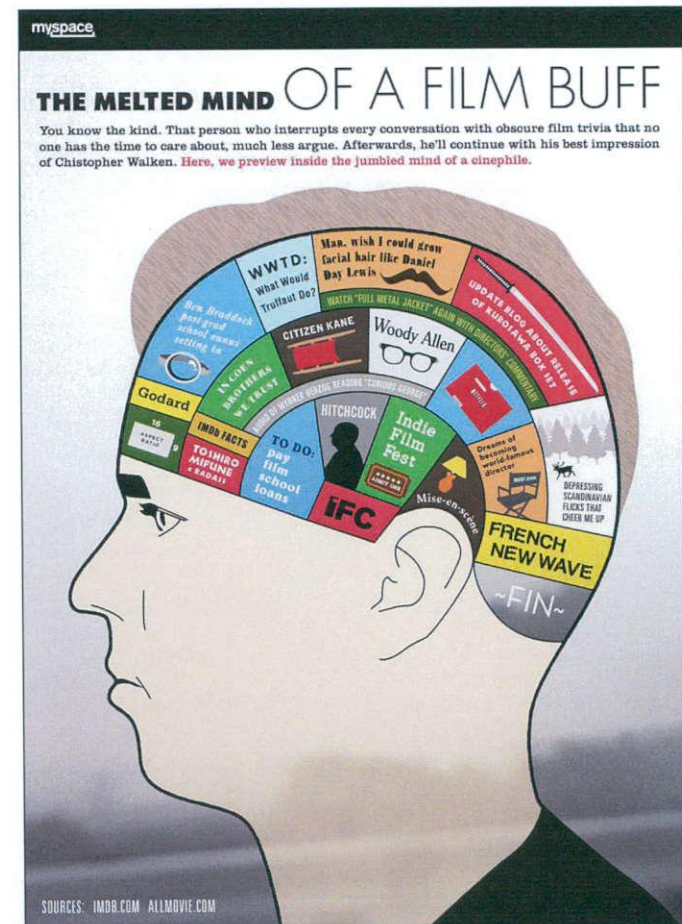


FIGURE 1.6 The Cool Factor.

Infographics serve practical business communication goals, but also work because they are cool and aesthetically pleasing. This fun infographic, created by Column Five for MySpace, shows the quirky inner-workings of the mind of a film buff. (Source: Column Five for MySpace. You can view the full version of this infographic at <http://bitly.com/yHhoN9>)

easelly



Crash Course IN Infographics



A
RESOURCE
FOR



Educators



Those Who
Want to
Illustrate
a Point



Marketers

Words: Bryce Bladon Layout: Etienne Poulin

What Are Infographics?

An infographic uses visuals—sometimes supported by text—to represent information or data, often with the aim of educating or informing an audience.

easelly

Why Do Infographics Matter?

Infographics are an effective way to educate or inform an audience. They can be used to make complex data easier to understand and digest.

5x

We receive 5x as much information as we did in 1986¹

Users only read roughly **1/4** of the words on a webpage³

We process the equivalent of 100,000+ words (that's 34GB!)² on an average day. And that's not even including time spent at work!

100,000+

Visual Information on the Rise

There are 4x as many visuals in literature since 1990⁴

Visual information has increased by over 9000% on the internet⁵

As of 2015, there are **62 million search results** for "infographic" and that number is projected to increase



70% of marketers plan to increase their use of original visual assets in 2015⁶

People Like Pretty Pictures

We are 30x more likely to read an infographic than a text article

90% of information transmitted to the brain is visual

Color images make people 80% more likely to read something

Images Are Great Teachers

There's a 70% rate of understanding for text-only labels, and a 95% rate of understanding for text and picture labels⁷

People follow instructions over 3x better with text and illustrations versus those following text-only instructions⁸

People recall 80% of what they see and do, 20% of what they read, and 10% of what they hear⁹

65% of people are visual learners

It only takes 150ms for a symbol to be processed¹⁰ and another 100ms to attach a meaning to it¹¹

easelly

A Checklist for Every Good Infographic Ever

Infographics support **focused data** with **good design** to tell a **shareable story** in a clear and concise manner.

The quotes come from industry experts.

Focused data:

- ✓ **Use relevant data**
"A great infographic allows the viewer to grasp the implications of big data."
– @Steveology
- ✓ **Fact-check**
"If the data you're working with is untrustworthy, then your infographic will be too."
– Tiffany Farrant-Gonzalez
- ✓ **Credit your sources**

"A great infographic allows the viewer to grasp the implications of big data."
– @Steveology

Clear design:

- ✓ **Limit your color palette**
- ✓ **Use simple graphics**
- ✓ **Use data visualizations that most clearly illustrate the data**
- ✓ **Convey the message at a glance**
"Take a lot of data, or a number of concepts, and boil it down to one image."
– @mvolpe
- ✓ **Establish a connection between sections**
- ✓ **Good infographics utilize the hierarchy of information**
See "The Simplest Infographic Structure" section
- ✓ **Make sure the graphics and numbers match**
- ✓ **Limit width to 735 pixels (it's the standard)**
- ✓ **Anything over 5000 pixels tall will lose attention**
"Too many infographics now are too darned big."
– @TDefren

Shareable story:

- ✓ **Answer an interesting question to grab audiences**
"A good infographic starts with a good 'why' question."
– @ConversationAge
- ✓ **Use rational data to elicit an emotional response**
- ✓ **Graphics should tell the story**
"A great infographic tells a meaningful story in an instant."
– @Jowyang
- ✓ **Use as little text (as possible) in a clear font**
"If your infographic is supplemented with 1,000 words, you've missed the mark."
– @mikemacfarlane
- ✓ **Make the file as small as possible (compressed .jpeg) without sacrificing fidelity**
- ✓ **Don't forget to sign it with an embed code**

easelly

The 7 Common Types of Infographic

Visual Article



BLAH! Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit

Makes a piece of writing more visual

Best used to:

- cut down on text
- make a plain article more interesting
- increase sharing potential

List



Supports a claim through a series of steps

Best used to:

- support a specific claim or argument

Map



Shows data trends based on location

Best used to:

- compare places and cultures via setting-centric data

Versus



Compares two things in a head-to-head study

Best used to:

- highlight differences between two similar things
- highlight similarities between two unlike things
- prove one option is superior/inferior to the other

Data Visualization

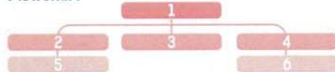


Communicates data through charts, graphs, and/or design

Best used to:

- make data-driven arguments easier to understand
- make facts and statistics more interesting to absorb

Flowchart

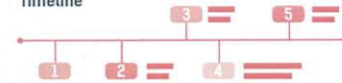


Provides a specialized answer to a question via reader choices

Best used to:

- provide personalized answers for readers
- showcase how multiple situations can reach the same conclusion

Timeline



Tells a story through a chronological flow

Best used to:

- show how something has changed over time
- make a long, complicated story easier to understand
- show how one thing leads to another

easelly

The 13-Step Guide to Building an Infographic

Steps 1-4 will help you make your rough outline

Steps 5-10 will help you design your infographic

Steps 11-13 will help you ensure the quality

1 Consider your audience

Who are you creating this infographic for? What would they be interested in knowing?

2 Create a thesis/question

If there was a question your infographic is going to answer, what is it?

3 Focus it

Now that you know your question, remove any and all information that isn't in support of answering that question or addressing the topic behind it.

4 Tell a story to create flow

In terms of design, people read left to right and top to bottom. But equally important is that your infographic has a narrative; make sure there is a logical flow to your points, and that each one leads into the next.

5 Brevity is the soul of wit

The appeal of infographics is that they take big, complex things, and they make them into something almost anyone can understand. Too much information, too much text, or too many graphics can make it difficult to understand and unappealing to read.

6 A picture is worth a thousand words

Text can be necessary for minute clarifications, but your graphics should be doing all the heavy lifting. What can be summarized or represented graphically?

7 Limit color and font choices

Though there are exceptions to this rule, two fonts and three colors is usually more than enough. Be consistent with font sizes too.

8 Make it viewable and legible

Your infographic should be readable and coherent even if it isn't quite full size.

9 White space is good

Don't clutter up your design—give the graphics and text room to breathe.

10 Don't get too big

735 pixels wide and fewer than 5000 pixels tall is ideal. 8000 pixels tall is an absolute limit; the smaller it is, the easier it is to download, share, and view.

11 Use accurate data

Double check that decimal points are in the right place and that there aren't too many zeroes in spots. Ensure stats are true, sources are reliable, and that graphics accurately represent their content.

12 Credit your sources

You can do this next to each fact, or in a reference list at the end of your infographic.

13 Sign it

Don't forget to credit yourself, your site, and anyone else involved.

easelly



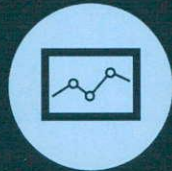
Use the news

Topics inspired by sites like news.google.com and news.yahoo.com are great for media pitches



Help a Reporter

HARO (www.helpareporter.com) is a daily email newsletter with story ideas that could turn into infographics



Check what's trending

Reddit, Twitter, and Facebook will all tell you what's popular via their Trending Topics sections

How to Come up with a Winning Idea for an Infographic

Ideas come from a lot of places, but for infographics, access to new data and timely topics is particularly important.

Explore existing infographics

Use Google Images, Pinterest, or one of the infographic directories for inspiration and to get an idea of what audiences like



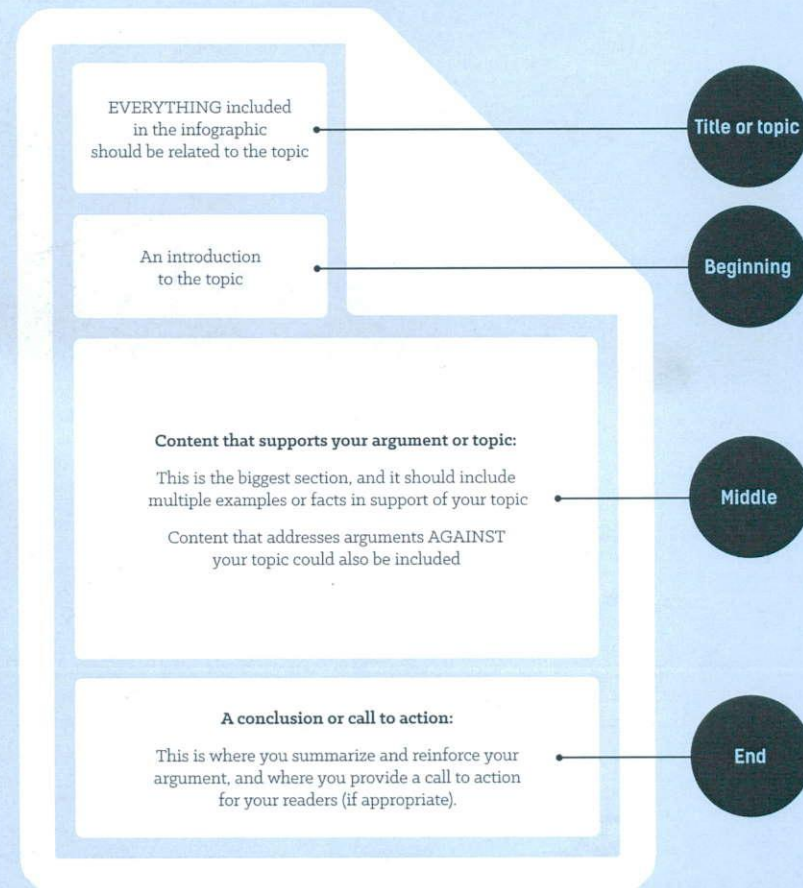
Lean on your own expertise

Try to create an informative infographic on a niche you know well



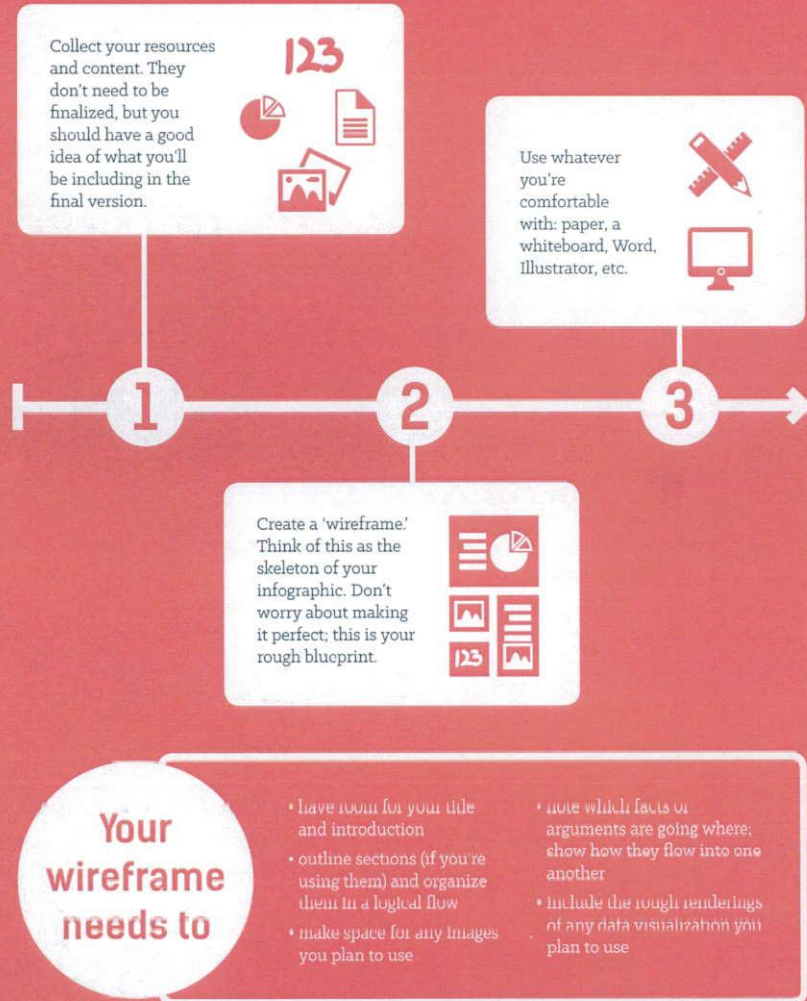
The Simple Infographic Structure

Every infographic benefits from this basic structure. Infographics follow the same structure as a good paper or news article.



easelly

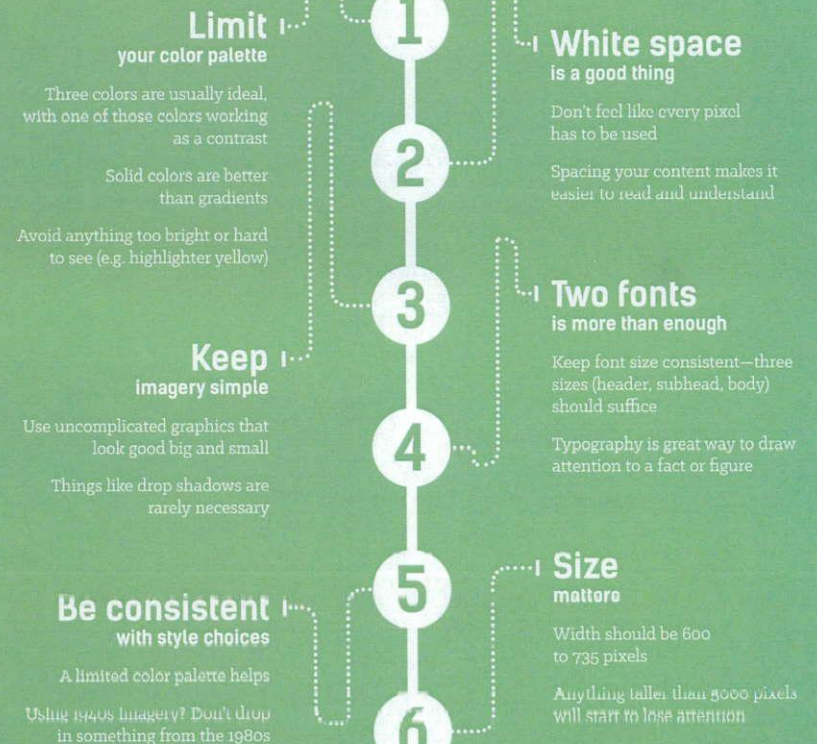
How to Outline an Infographic



easelly

6 Best Practices for Designing an Infographic

Infographics are all about visuals; make sure yours looks its best.



easelly

Answer

1

a question with your infographic: for example, the title of this section addresses "how to create a marketable infographic"

2

Tie

your infographic into a popular or trending topic: this is the least universal suggestion, and one that varies depending on the topic, but if you're trying to get your infographic noticed, tying it to something popular will garner that initial attention (and can help you decide where you can submit your infographic in the later steps)

Use

3

useful data: one interesting fact is worth more than a dozen middling ones; a fact like this can be the lynchpin for your infographic and the reason it's shared by others

6 Best Practices for Creating Marketable Infographics

4

Make

information digestible: the main purpose of infographics is to distill facts down into something palatable for non-expert audiences; the use of graphics and succinct text is how most infographics accomplish this

Inform

5

your sources: sourcing your facts is good practice; letting your sources know you used them can bring in additional eyes

6

Cater

to short attention spans: it's always tempting to include every fact, but keeping infographics short and sweet is a big part of what makes them so enjoyable to read

easelly

3 Free Ways to Market Your Infographic

Paying for SEO or a sponsored tweet will work wonders, but there are plenty of free options



Submit to blogs, collections, and directories.

Reach out to industry experts. Bloggers and prominent twitter users are always hungry for content.

Add your infographic to relevant collections and directories. Here are a few places to submit your infographic:

[Easel.ly](#)
[Charts Bin](#)
[Pinterest](#)
[Daily Infographic](#)
[Cool Infographics](#)
[Infographics Archive](#)
[Infographic Journal](#)
[Infographics Showcase](#)
[Visual Loop](#)
[Chart Porn](#)
[Daily Infographic](#)
[Flickr \(Infographics Group\)](#)
[Reddit's Infographics Subreddit](#)



Leverage social media

Make sure social bookmarking tools (e.g. "Share on Facebook" buttons) are next to the source site for your infographic.

Twitter follow button: <https://twitter.com/about/resources/buttons#follow>

Twitter share button: <https://twitter.com/about/resources/buttons#tweet>

Twitter hashtag button: <https://twitter.com/about/resources/buttons#hashtag>

Twitter "Tweet this" button: <http://clicktotweet.com>

Facebook like button: <https://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like-box/>

Facebook share button: <https://developers.facebook.com/docs/plugins/share-button>

LinkedIn follow button: <https://developer.linkedin.com/plugins/follow-company>

LinkedIn share button: <https://developer.linkedin.com/plugins/share-button>

Pinterest follow button: http://business.pinterest.com/widget-builder/#do_follow_me_button

Pinterest "pin it" button: http://business.pinterest.com/widget-builder/#do_pin_it_button



Include an embed code

An absolute necessity! This is our favorite resource: <http://www.siegemedia.com/embed-code-generator>

easelly

Reference List

¹ Richard Alleyne (2011). Welcome to the information age,
The Telegraph

² Bohn, R., Short, J. (2012). Measuring Consumer
Information, International Journal of Communication 6

³ Nielsen J. (2008). How Little Do Users Read?,
Nielsen Norman Group, by

⁴ Google Books Ngram Viewer

⁵ Google Trends

⁶ The Content Marketer's Fact Pack, One Spot

⁷ Thorpe S., Fize D., Marlot C. (1996). Speed of processing
in the human visual system, Nature, Vol 381.

⁸ Holcomb P., Grainger J. (2006). On the Time Course
of Visual Word Recognition, Journal of Cognitive
Neuroscience, Vol 18.

⁹ Dowse R., Ehlers M. (2005). Medicine labels incorporating
pictograms: do they influence understanding and
adherence? MEDLINE

¹⁰ W. Howard Levie, Lentz R. (1982). Effects of text
illustrations: A review of research, ETR&D Winter 1982,
Volume 30, Issue 4, pp 195-232.

¹¹ Lester, P. M. (2006). Syntactic Theory of Visual
Communication

Words

Bryce Bladon
brycebladon.com

easelly

Layout

Etienne Poulin
etiennepoulin.com



KEGIATAN 4 “Pembimbingan Pembuatan Infografis”

Waktu Pelaksanaan : Agustus I
Tahapan Kegiatan : 1. Konsultasi dengan koordinator bidang ;
2. Menentukan data penelitian kelompok bidang PDN yang akan dibuat ke dalam bentuk infografis
3. Menghubungi narasumber yang berkompetensi di infografis untuk meminta kesediaan waktunya
4. Pembimbingan pembuatan infografis oleh rekan kerja yang berkompetensi di bidang infografis
5. Melaporkan dan mendiskusikan hasil bimbingan infografis dengan mentor
Output : Draf awal desain

LAPORAN KEGIATAN PEMBIMBINGAN PEMBUATAN INFOGRAFIS

1. Kegiatan pembimbingan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 , di Ruang tamu Puslit, Gedung Nusantara I, lantai 2.
2. Pembimbing: Andi Muslim, pakar infografis dari indonesiabaik.id
3. Tulisan yang banyak dalam suatu laporan yang akan dijadikan infografis harus berani dipangkas agar lebih cepat terbaca. Untuk itu memerlukan icon.
4. Icon diperlukan selain untuk membantu menjelaskan isi secara visual, juga untuk menambah permainan tampilan infografis, sehingga orang lebih tertarik untuk melihat lebih detail (*zooming in*).
5. Icon dapat menggunakan gambar yang ada di internet. Cari file .png atau vector.
6. Aplikasi dapat menggunakan apapun yang mudah dikuasai.
7. Hak cipta icon sebetulnya bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Gambar yang ada di google umumnya sudah “*free market*”.
8. Untuk infografis instansi DPR sebaiknya tidak memakai akun yang gratisan, karena akan ada ‘*watermark*’ pada tampilan akhir yang malah menurunkan wibawa instansi.
9. Perlu membuat template yang konsisten pada setiap lembar infografis agar infografis Puslit memiliki ciri khas. Misalnya dengan menetapkan satu warna standar, style kartun / *real* / ikon, dan sebagainya.
10. Infografis butuh *signature*. Bagaimanapun bentuk infografisnya akan selalu *signature* nya yang memuat logo, website, akun media sosial, dll, yang berfungsi sebagai pengunci pesan.
11. *Signature* juga berfungsi untuk memudahkan orang untuk mencari karya yang lain. Misal ada satu infografis puslit yang sudah beredar melalui *whatsapp* (bukan melalui website puslit), maka orang tersebut langsung mengetahui bahwa infografis ini karya Puslit DPR, sehingga dapat menggugah orang tersebut untuk mencari karya puslit yang lainnya.
12. *Signature* letaknya konsisten, tapi desain pilihan warna menyesuaikan desain
13. Jangan lupa untuk selalu mencantumkan sumber konten infografis

14. Jika mencantumkan logo instansi, selalu menempelkan logo tersebut dengan background putih agar logo tidak 'hilang'. Dan supaya tidak terlalu *blocking*, diakali dengan desain pita/banner.
15. Terkait masalah hak cipta, *icon* yang diambil di internet dapat dimodifikasi (mengganti warna, menambahkan elemen, dsb) sehingga *icon* tersebut sudah berubah dan melepaskan hak cipta.

Kalaupun ada yang mempermasalahkan hak cipta, infografis yang dibuat ini bukanlah sebuah produk komersil dari suatu merk dagang. Apalagi, Puslit adalah *government* yang tidak mungkin mengambil keuntungan ekonomi dari infografis

Mengetahui,
Mentor



Drs. Ahmad Budiman, M.Pd
NIP 19690422 199703 1 004

Jakarta, 3 Agustus 2018
Peserta Latsar CPNS,



Siti Chaerani Dewanti, S.Ars, M.Si
NIP 19870429 201801 2 001

DOKUMENTASI AKTUALISASI KEGIATAN 4



UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA



Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi UU tentang Pelayanan Publik

Lokasi Penelitian



Kabupaten Lombok Utara

- Berusia <10 tahun
- Kategori Merah (rendah)*
- Daerah Otonom Baru terbaik**

Kota Yogyakarta

- Berusia > 10 tahun
- Kategori Hijau (tinggi)*

* Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik versi Ombudsman tahun 2016
** versi Kementerian Dalam Negeri

Temuan Penelitian



Belum ada Perpres mengenai
Mekanisme Ganti Rugi



Penyelenggara pelayanan
belum mematuhi **Standar
Pelayanan Publik**



Belum berorientasi pada
Kepuasan Masyarakat



Terlalu banyak institusi yang
menyelenggarakan survey
sehingga menghabiskan waktu



Implementasi masih bergantung pada:
**kepemimpinan, anggaran, &
kepedulian masyarakat**

Rekomendasi

**Meningkatkan kewenangan
pengawasan** oleh DPR, DPRD,
Provinsi, & DPRD Kab/Kota

Segara mensahkan Perpres
mengenai **Mekanisme Ganti Rugi**

Menunjuk Kemen PAN & RB
sebagai lembaga yang
mensinergikan survey terkait
pelayanan publik

Mendorong **pelayanan publik
berbasis mobile**

menyelesaikan praktek pungli &
pelayanan berbelit melalui
sistem penganggaran

Sumber: Hasil Penelitian Kelompok Bidang PDN tahun 2016
(Riris Katharina, Handrini Ardiyanti, Debora Sanur, Dewi Sendhikasari)
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

powered by

PIKTOCHART

Persandian di Pemerintahan Daerah



Pasal 18 UUD 1945

mengamanatkan bahwa daerah berhak mengatur sendiri terhadap kewenangan yang didelegasikan kecuali terhadap urusan yang oleh Undang-undang ditentukan oleh Pemerintah Pusat

PERSANDIAN

merencegah penyalahgunaan kewenangan daerah dalam menyandikan kebijakan yang menjadi kepentingan publik untuk kepentingan kekuasaan

Fakta di Lapangan



BENTURAN SIFAT PENGELOLAAN

semakin tertutup sifat pengelolaan, semakin rendah akuntabilitas. Berbenturan dengan sifat pelayanan publik yang harus terbuka



DILEMA PERSANDIAN

persandian dianggap sebagai urusan militer, bertentangan dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik



KETERBATASAN ALAT & SANDIMAN

alat persandian masih di mi iki oleh pusat, tenaga sandiman masih terbatas karena memiliki kriteria dan keahlian khusus



MEKANISME BELUM STANDAR

pemahaman terhadap kriteria informasi yang disandikan belum sama, tugas & kewajiban belum jelas



Rekomendasi

Memiliki PAYUNG HUKUM yang jelas dalam mengatur persandian kelembagaan

#1

MENYEIMBANGKAN unsur ketertutupan dan unsur autentifikasi dokumen

#2

PEMBAKUAN MEKANISME persandian dalam regulasi:

- TUGAS & kewajiban
- PENGAMATAN Persandian
- KOORDINASI persandian antar institusi

#3

PENGEMBANGAN kualitas & kuantitas SDM serta sarana prasarana persandian

#4

**Demi terselenggaranya persandian yang
PROFESIONAL, AMAN, DAN OTENTIK**

Tata Kelola



CYBERsecurity



Perkembangan penggunaan teknologi di media maya (*cyber*) harus disertai dengan kewaspadaan terhadap kejahatan (*cybercrime*)

pencurian identitas / data
(sumber data informasi)



malware / malicious code, fraud, spionase industry

pembajakan akun
(email, IM, social network)



cyber warfare
(perang di dunia maya)

Kegunaan Cyber Security

pada pemerintahan daerah



◀ mengamankan hal terkait **kepemiluan**
mengamankan media sosial dari penyalahgunaan, *black campaign*, *real count Pilkada*, peningkatan partisipasi, sosialisasi



◀ mencegah **potensi konflik** dari media sosial
potensi konflik di facebook terbawa ke dunia nyata, konten materi terkait SARA, hoax, atau ujaran kebencian



◀ meningkatkan **pelayanan publik**
menjaga konsistensi informasi, menjaga kerahasiaan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan

Rekomendasi

1

Penataan Cyber Security

menambah SDM kompeten, peningkatan anggaran pembangunan keamanan siber, penyediaan perangkat teknologi modern, & membentuk peraturan terkait sistem keamanan siber skala nasional

2

Penguatan Kapasitas Teknologi Informasi

anggota KPU & Bawaslu harus memahami TI agar dapat terjadi sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih, pengamanan data kepemiluan, serta mencegah penyalahgunaan media sosial

3

Pengembangan Political Will di Pemerintah

- pencerdasan masyarakat untuk menangkal hoax
- mencegah provokasi di media
- mengembangkan sistem pemerintahan berbasis *online*

Sumber: Hasil Penelitian Kelompok Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2017
(Ahmad Budiman, Prayudi, Aryojati Pandanto)
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

powered by

DIKTOCHART



MODEL TATA KELOLA

Dana Desa



UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa:

"desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan & kualitas hidup masyarakat desa

PERUBAHAN PENGATURAN

Pendapatan Desa

UU No. 32 Tahun 2004 & PP No. 72 Tahun 2005	UU No. 6 Tahun 2014
- Alokasi Dana Desa 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi belanja pegawai - Jalur anggaran APBN hanya dalam bentuk bantuan langsung masyarakat	- Alokasi Dana Desa 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus - Jalur anggaran APBN, besaran alokasi yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap - Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

KENDALA PENGELOLAAN

Dana Desa



kinerja kabupaten kalah cepat dengan desa



masyarakat masih pasif di musyawarah desa



tenaga pendamping kurang memadai



belum semua SDM menguasai Siskeudes



jaringan internet kurang lancar

REKOMENDASI TATA KELOLA

Dana Desa



keteladanan kepemimpinan: visioner & misioner



kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan

memenuhi substansi*:



- Kapasitas** (responsif, perencanaan & anggaran baik, mobilisasi sumber daya lokal)
- Efektivitas** (kesesuaian perencanaan & pelaksanaan, tepat sasaran)
- Akuntabilitas** (otentik, transparan, bersih, bebas korupsi)

*menurut Soetoro Eko (Dosen Kampus APMD Yogyakarta)

KESIMPULAN

UU Desa hadir untuk **mengangkat harkat martabat desa**. Dana desa diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang bertanggung jawab, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

UU Desa mendorong desa menjadi **lembaga demokratisasi dan mandiri**



KEGIATAN 5

“Pembuatan Infografis Hasil Penelitian Bidang PDN yang Telah Ditentukan & Laporan kepada Tim Koordinasi Penelitian”

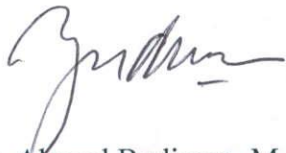
- Waktu Pelaksanaan : September I
- Tahapan Kegiatan : 1. Konsultasi dengan koordinator bidang ;
2. Menentukan konten, narasi, sketsa, dan brainstorming infografis
3. Membuat draf desain awal infografis
4. Pemaparan draf desain awal infografis dengan tim penelitian kelompok dan koordinator bidang PDN
5. Finalisasi desain
6. Melaporkan hasil desain infografis ke koordinator bidang dan tim koordinasi penelitian Puslit
- Output : notulensi & produk infografis siap didiseminasi

LAPORAN KEGIATAN PEMBUATAN INFOGRAFIS HASIL PENELITIAN BIDANG PDN & LAPORAN KEPADA TKP

1. Kegiatan laporan infografis dilakukan pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 , di Ruang Rapat Puslit, Gedung Nusantara I, lantai 2.
2. Moderator oleh Mentor CPNS, Bpk. Ahmad Budiman.
3. Bentuk infografis sebagai salah bentuk diseminasi merupakan salah satu contoh nyata bagi perkembangan Puslit. Bahkan bisa dilanjut untuk mengadakan presentasi hasil penelitian ke AKD terkait.
4. Catatan dalam pembuatan infografis:
 - a) Perlu ada approval bertingkat, mulai dari tingkat PDN, lalu TKP, dan Kapuslit
 - b) Desain template infografis bebas, menyesuaikan kebutuhan masing-masing penelitian
 - c) Perlu menampilkan logo, agar produk infografis terlihat resmi (*official*)
 - d) Menambahkan *disclaimer* di akhir tampilan: “hasil riset yang lebih lengkap dapat diakses di www.puslit.dpr.go.id
5. Puslit harus menentukan lebih condong ke infografis atau *research poster*, karena keduanya berbeda dari segi isi dan penyajiannya
6. Agar lebih ‘berwibawa’ dan mengangkat citra DPR / Puslit, sebaiknya infografis yang dibuat tidak menggunakan template gratisan.
7. Desain infografis, harus tetap mengutamakan sifat informatif. Desain tidak menggunakan warna-warna gelap yang menyulitkan orang untuk membacanya.
8. Untuk pembuatan infografis, ada kemungkinan membentuk tim khusus, oleh karena itu memerlukan SOP yang jelas agar memudahkan dalam prosesnya.
9. Rekomendasi SOP pembuatan infografis:

- a) Tim penelitian membuat exsum penelitian yang sudah memiliki standar format seragam
- b) Tim infografis membuat konten infografis sambil tetap berkoordinasi dengan tim penelitian
- c) Mengajukan verifikasi desain infografis dan approval kepada tim penelitian dan kaPuslit
- d) Distribusi melalui media web puslit

Mengetahui,
Mentor



Drs. Ahmad Budiman, M.Pd
NIP 19690422 199703 1 004

Jakarta, 7 September 2018
Peserta Latsar CPNS,



Siti Chaerani Dewanti, S.Ars, M.Si
NIP 19870429 201801 2 001

DOKUMENTASI AKTUALISASI KEGIATAN 5





SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

3 September 2018

Nomor : BK/14819/SETJEN DAN BK DPRRI/PP/09/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Internal Bidang PDN

Kepada Yth.

1. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang;
2. Kepala Pusat Kajian Anggaran;
3. Para Peneliti Bidang Politik Dalam Negeri
Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
Di
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, undangan rapat internal bidang Politik Dalam Negeri, dengan agenda diskusi diseminasi hasil penelitian kelompok bidang PDN (infografis), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 6 September 2018

Waktu : 10.00 WIB - Selesai

Tempat : R.R. Pusat Penelitian

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara untuk hadir pada acara dimaksud.

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian,

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
NIP. 197111171998031004



HARI / TANGGAL : Kamis, 6 September 2018
WAKTU : 10.00 - selesai
TEMPAT : R. Rapat Puslit
ACARA : Rapat Puslit
TEMA : diseminasi hasil penelitian kelompok PDN

[illegible]

MODEL TATA KELOLA *Dana Desa*



UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa:

"desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan & kualitas hidup masyarakat desa

PERUBAHAN PENGATURAN *Pendapatan Desa*

UU No. 32 Tahun 2004 & PP No. 72 Tahun 2005	UU No. 6 Tahun 2014
• Alokasi Dana Desa 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi belanja pegawai • Jalur anggaran APBN hanya dalam bentuk bantuan langsung masyarakat	• Alokasi Dana Desa 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus • Jalur anggaran APBN, besaran alokasi yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap • Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

KENDALA PENGELOLAAN *Dana Desa*



kinerja kabupaten kalah cepat dengan desa



masyarakat masih pasif di musyawarah desa



tenaga pendamping kurang memadai



belum semua SDM menguasai Siskeudes



jaringan internet kurang lancar

REKOMENDASI TATA KELOLA *Dana Desa*



keteladanan kepemimpinan: **visioner & misioner**



kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan



memenuhi substansi*:

- **Kapasitas** (responsif, perencanaan & anggaran baik, mobilisasi sumber daya lokal)
- **Efektivitas** (kesesuaian perencanaan & pelaksanaan, tepat sasaran)
- **Akuntabilitas** (otentik, transparan, bersih, bebas korupsi)

*menurut Soetoro Eko (Dosen Kampus APMD Yogyakarta)

KESIMPULAN

UU Desa hadir untuk **mengangkat harkat martabat desa**. Dana desa diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang bertanggung jawab, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

UU Desa mendorong desa menjadi **lembaga demokratisasi** dan **mandiri**

Tata Kelola



Perkembangan penggunaan teknologi di media maya (*cyber*) harus disertai dengan kewaspadaan terhadap kejahatan (*cybercrime*)

pencurian identitas / data
(sumber daya informasi)



malware : *malicious code*,
fraud, *spionase industry*

pembajakan akun
(email, IM, social network)



cyber warfare
(perang di dunia maya)

Kegunaan Cyber Security

pada pemerintahan daerah



◀ mengamankan hal
terkait **kepemiluan**
mengamankan media sosial dari
penyalahgunaan, *black campaign*,
real count Pilkada, peningkatan
partisipasi, sosialisasi



◀ mencegah **potensi
konflik** dari media
sosial
potensi konflik di facebook
terbawa ke dunia nyata, korban
materi terkait SARA, hoax, atau
hujatan kebencian



◀ meningkatkan
pelayanan publik
menjaga otentitas informasi,
menjaga kerahasiaan informasi
yang termasuk dalam kategori
informasi yang dikecualikan

Rekomendasi

1

Penataan Cyber Security

menambah SDM kompeten, peningkatan anggaran pembangunan keamanan siber, penyediaan perangkat teknologi modern, & membentuk peraturan terkait sistem keamanan siber skala nasional

2

Penguatan Kapasitas Teknologi Informasi

anggota KPU & Bawaslu harus memahami TI agar dapat terjadi sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih, pengamanan data kepemiluan, serta mencegah penyalahgunaan media sosial

3

Pengembangan Political Will di Pemerintah

- pencerdasan masyarakat untuk menangkal hoax
- mencegah provokasi di media
- mengembangkan sistem pemerintahan berbasis online

Persandian di Pemerintahan Daerah

Pasal 18 UUD 1945

mengamanatkan bahwa daerah berhak mengatur sendiri terhadap kewenangan yang diotonomikan, kecuali terhadap urusan yang oleh Undang-undang ditentukan oleh Pemerintah Pusat

PERSANDIAN

mencegah penyalahgunaan kewenangan daerah dalam menyandikan kebijakan yang menjadi kepentingan publik untuk kepentingan kekuasaan

Fakta di Lapangan



BENTURAN SIFAT PENGELOLAAN

semakin tertutup sifat pengelolaan, semakin rendah akuntabilitas. Berbenturan dengan sifat pelayanan publik yang harus terbuka



DILEMA PERSANDIAN

persandian dianggap sebagai urusan militer, bertentangan dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik



KETERBATASAN ALAT & SANDIMAN

alat persandian masih dimiliki oleh pusat, tenaga sandiman masih terbatas karena memiliki kriteria dan keahlian khusus



MEKANISME BELUM STANDAR

pemahaman terhadap kriteria informasi yang disandikan belum sama, tugas & kewajiban belum jelas



Rekomendasi

Memiliki PAYUNG HUKUM yang jelas dalam mengatur persandian kelembagaan

#1

MENYEIMBANGKAN unsur kerahasiaan dan unsur autentifikasi dokumen

#2

PEMBAKUAN MEKANISME persandian dalam regulasi:

- TUGAS & kewajiban
- PENGAMANAN Persandian
- KOORDINASI persandian antar institusi

#3

PENGEMBANGAN kualitas & kuantitas SDM serta sarana prasarana persandian

#4

**Demi terselenggaranya persandian yang
PROFESIONAL, AMAN, DAN OTENTIK**

UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi UU tentang Pelayanan Publik

Lokasi Penelitian



Kabupaten Lombok Utara

- Berusia <10 tahun
- Kategori Merah (rendah)*
- Daerah Otonom Baru terbaik**

Kota Yogyakarta

- Berusia > 10 tahun
- Kategori Hijau (tinggi)*

* Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik versi Ombudsman tahun 2016

** versi Kementerian Dalam Negeri

Temuan Penelitian



Belum ada Perpres mengenai
Mekanisme Ganti Rugi



Penyelenggara pelayanan
belum mematuhi **Standar
Pelayanan Publik**



Belum berorientasi pada
Kepuasan Masyarakat



Terlalu banyak institusi yang
menyelenggarakan survey
sehingga menghabiskan waktu



Implementasi masih bergantung pada:
**kepemimpinan, anggaran, &
kepedulian masyarakat**

Rekomendasi

**Meningkatkan kewenangan
pengawasan** oleh DPR, DPRD,
Provinsi, & DPRD Kab/Kota

Menunjuk Kemen PAN & RB
sebagai lembaga yang
mensinergikan survey terkait
pelayanan publik



Segera mensahkan Perpres
mengenai **Mekanisme Ganti Rugi**

Mendorong **pelayanan publik
berbasis mobile**

menyelesaikan praktek pungli &
pelayanan berbelit melalui
sistem penganggaran

Sumber: Penelitian Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Kode Pos 10270

Telepon: (021) 5715349; Fax: (021) 5715 432/925; Website: www.dpr.go.id

KEGIATAN 6

“Pendiseminasian Infografis Hasil Penelitian Bidang PDN melalui Website Puslit dan Komisi Terkait”

Waktu Pelaksanaan : September III

Tahapan Kegiatan : 1. Mencetak infografis hasil penelitian;
2. Mendistribusikan infografis hasil penelitian PDN ke komisi terkait
3. Berkoordinasi dengan admin website Puslit untuk pemuatan infografis

Output : 4. Menyerahkan soft file infografis ke admin website
: termuatnya infografis di website Puslit & infografis terdiseminasi ke komisi terkait

**LAPORAN KEGIATAN PENDISEMINASIAN INFOGRAFIS
HASIL PENELITIAN BIDANG PDN MELALUI WEBSITE
PUSLIT DAN KOMISI TERKAIT**

1. Menghubungi admin website Puslit, T. Ade Soerya
2. File dikirim melalui email dengan format .jpeg
3. Kendala pemuatan infografis adalah file yang dapat diunggah harus dalam bentuk .pdf
4. Infografis penelitian telah berhasil dimuat pada website Puslit pada Hari Jumat, 21 September 2018
5. Pendiseminasian *flyer* infografis dilakukan dengan menghubungi Bagian Sekretariat Komisi terkait, Ibu Suprihatini (Kabagset Komisi I)
6. *Flyer* diserahkan kepada Sekretariat Komisi untuk selanjutnya dapat diserahkan kepada anggota dewan.
7. *Softcopy file* dikirimkan juga ke komisi melalui email.

Mengetahui,
Mentor

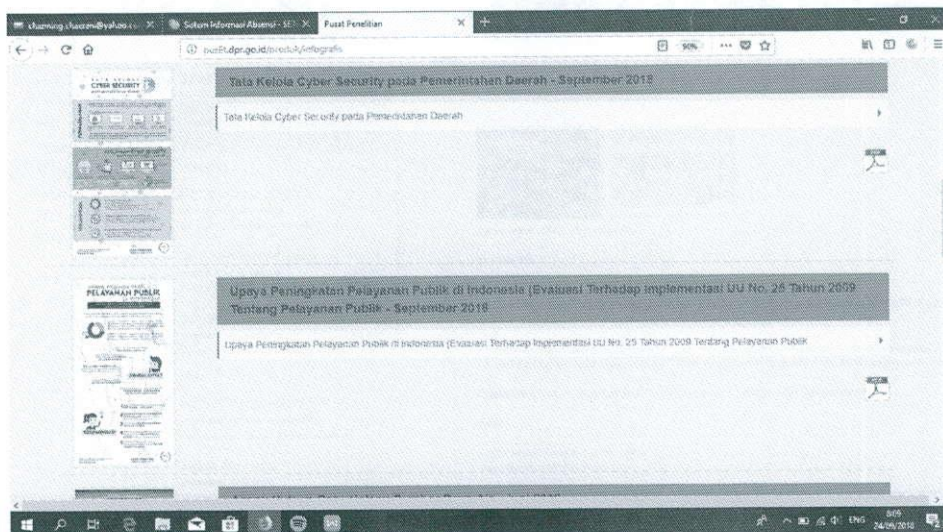
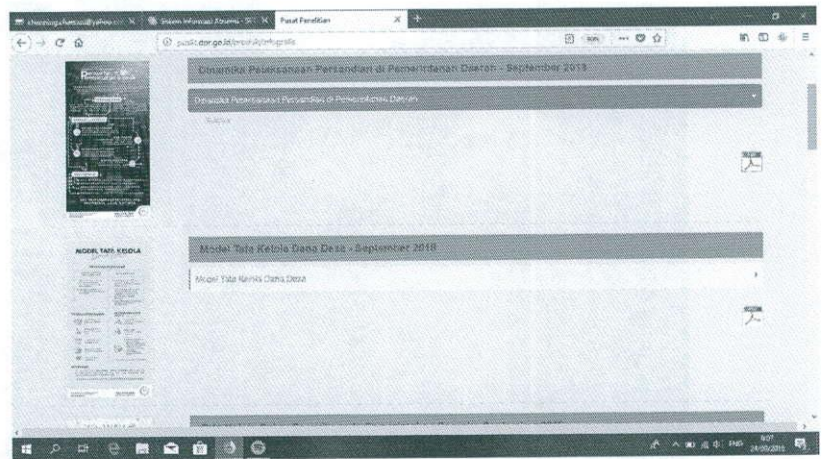
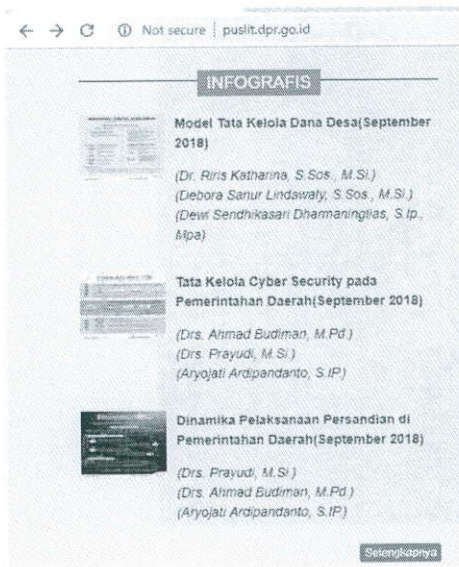
Drs. Ahmad Budiman, M.Pd
NIP 19690422 199703 1 004

Jakarta, 24 September 2018
Peserta Latsar CPNS,

Siti Chaerani Dewanti, S.Ars, M.Si
NIP 19870429 201801 2 001

DOKUMENTASI AKTUALISASI KEGIATAN 6

Infografis sudah termuat di website puslit



MODEL TATA KELOLA *Dana Desa*

PERUBAHAN PENGATURAN *Pendapatan Desa*

UU No. 32 Tahun 2004 & PP No. 72 Tahun 2005	UU No. 6 Tahun 2014
- Alokasi Dana Desa 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi belanja pegawai - Jalur anggaran APBN hanya dalam bentuk bantuan langsung masyarakat	- Alokasi Dana Desa 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus - Jalur anggaran APBN, besaran alokasi yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap - Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

KENDALA PENGELOLAAN *Dana Desa*



kinerja kabupaten kalah cepat dengan desa



masyarakat masih pasif di musyawarah desa



tenaga pendamping kurang memadai



belum semua SDM menguasai Siskeudes



jaringan internet kurang lancar

REKOMENDASI TATA KELOLA *Dana Desa*



keteladanan kepemimpinan: visioner & misioner



kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan



memenuhi substansi* :

- Kapasitas** (responsif, perencanaan & anggaran baik, mobilisasi sumber daya lokal)
- Efektivitas** (kesesuaian perencanaan & pelaksanaan, tepat sasaran)
- Akuntabilitas** (otentik, transparan, bersih, bebas korupsi)

*menurut Soetoro Eko (Dosen Kampus APMD Yogyakarta)

KESIMPULAN

UU Desa hadir untuk **MENGANGKAT HARKAT MARTABAT DESA**. Dana desa diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang bertanggung jawab, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

UU Desa mendorong desa menjadi **LEMBAGA DEMOKRASI & MANDIRI**



TATA KELOLA CYBER SECURITY

pada pemerintahan daerah



PERMASALAHAN

Perkembangan teknologi komunikasi melalui media maya (cyber), harus disertai dengan kesadaran terhadap potensi ancaman kejahatan (cybercrime).

Contoh kegiatan cybercrime:



pencurian data
(sumber daya informasi)



pembajakan akun
(email, social network)



malware/malicious
code, fraud, spionase



cyber warfare
(perang di dunia maya)

Tata kelola cyber security sangat diperlukan oleh pemerintah daerah, terutama jika terkait dengan pengembangan e-government, demi terciptanya pelayanan publik yang baik dan berbasis online.

KEGUNAAN CYBER SECURITY

pada pemerintahan daerah



mengamankan hal
terkait **KEPEMILUAN**

- penyalahgunaan medsos
- black campaign
- real count Pilkada
- peningkatan partisipasi
- sosialisasi



mencegah **POTENSI
KONFLIK** dari medsos

- potensi konflik di facebook
terbawa ke kehidupan nyata
- konten muatan SARA
- hoax
- hate speech



meningkatkan
PELAYANAN PUBLIK

- menjaga otentisitas informasi
- menjaga kerahasiaan
informasi yang termasuk
dalam kategori informasi
yang dikecualikan

REKOMENDASI



Penataan Cyber Security

- menambah SDM berkompeten
- peningkatan anggaran pembangunan keamanan siber
- penyediaan perangkat teknologi modern
- membentuk peraturan terkait sistem keamanan siber skala nasional.



Penguatan Kapasitas Teknologi Informasi

anggota KPU & Bawaslu harus memahami bahwa TI agar dapat terjadi sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilu, pengamanan data kepemiluan, serta mencegah penyalahgunaan media sosial.



Pengembangan Political Will di Pemerintah Daerah

- pencerdasan masyarakat untuk menangkal hoax
- mencegah provokasi di media
- mengembangkan sistem pemerintahan berbasis online



Dinamika Pelaksanaan

Persandian di Pemerintahan Daerah



"Persandian adalah rangkaian tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakikat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara"

PERMASALAHAN

Banyak terjadi kasus penyimpangan oleh beberapa Pemda akibat prinsip kerahasiaan melalui persandian yang dibangun justru dimanfaatkan untuk kepentingan sempit

Penyalahgunaan diskresi pejabat terhadap pengelolaan urusan persandian, mendorong terjadinya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan

FAKTA DI LAPANGAN

BENTURAN SIFAT PENGELOLAAN

semakin tertutup sifat pengelolaan, semakin rendah akuntabilitas. Berbenturan dengan sifat pelayanan publik yang harus terbuka

DILEMA PERSANDIAN

persandian dianggap sebagai urusan militer, bertentangan dengan UU No. 14/2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik

KETERBATASAN ALAT & SANDIMAN

alat persandian masih dimiliki oleh pusat, tenaga sandiman masih terbatas karena memiliki kriteria & keahlian khusus

MEKANISME BELUM STANDAR

pemahaman terhadap kriteria informasi yang disandikan belum sama, tugas & kewajiban belum jelas

REKOMENDASI

- membuat PAYUNG HUKUM yang jelas dalam mengatur persandian kelembagaan
- MENYEIMBANGKAN unsur kerahasiaan dan unsur otentifikasi dokumen
- PEMBAKUAN MEKANISME persandian dalam regulasi: (1) TUGAS & kewajiban, (2) PENGAMANAN persandian, (3) KOORDINASI antar institusi
- PENGEMBANGAN kualitas & kuantitas SDM serta sarana & prasarana persandian

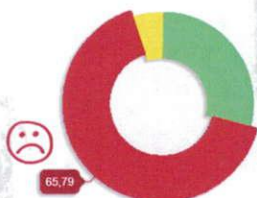
demi terselenggaranya persandian yang
PROFESIONAL, AMAN, & OTENTIK



UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI UU NO.25 TAHUN
2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Hadirnya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ternyata belum menghadirkan pelayanan publik yang layak, berkualitas, dan prima.



Survey Ombudsman tahun 2015 tentang tingkat Kepatuhan Penyelenggara Kepatuhan Publik pada level Kabupaten/Kota menunjukkan masih ada **65,79%** yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah.

Padahal salah satu upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik pada level pemerintah kabupaten/kota sudah dilakukan penataan daerah.

belum ada Perpres mengenai
MEKANISME GANTI RUGI

penyelenggara pelayanan
belum mematuhi **STANDAR
PELAYANAN PUBLIK**

TERLALU BANYAK INSTITUSI
yang menyelenggarakan survey,
sehingga menghabiskan waktu

belum berorientasi pada
KEPUASAN MASYARAKAT

KENDALANYA?

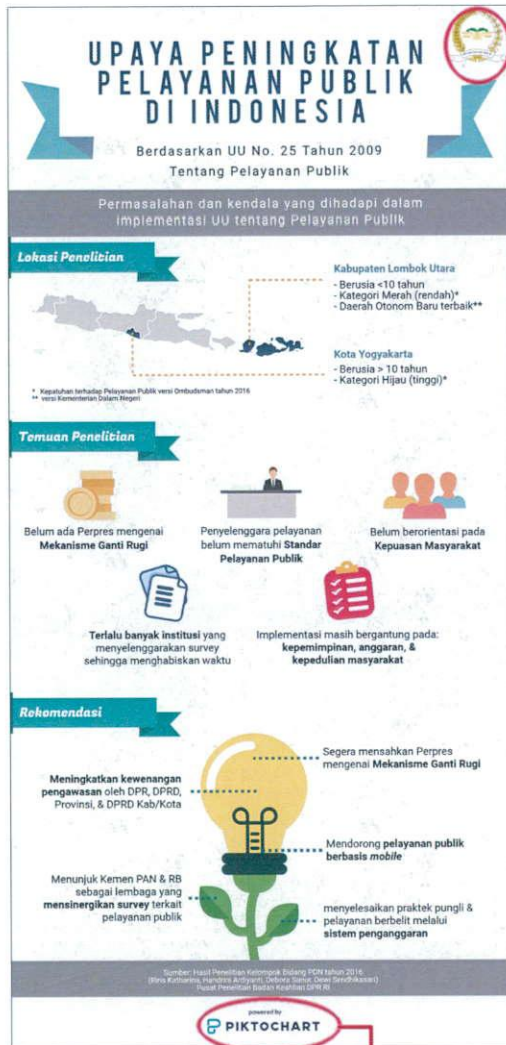
implementasi masih bergantung pada:
**KEPEMIMPINAN, ANGGARAN, &
KEPEDULIAN MASYARAKAT**



REKOMENDASI

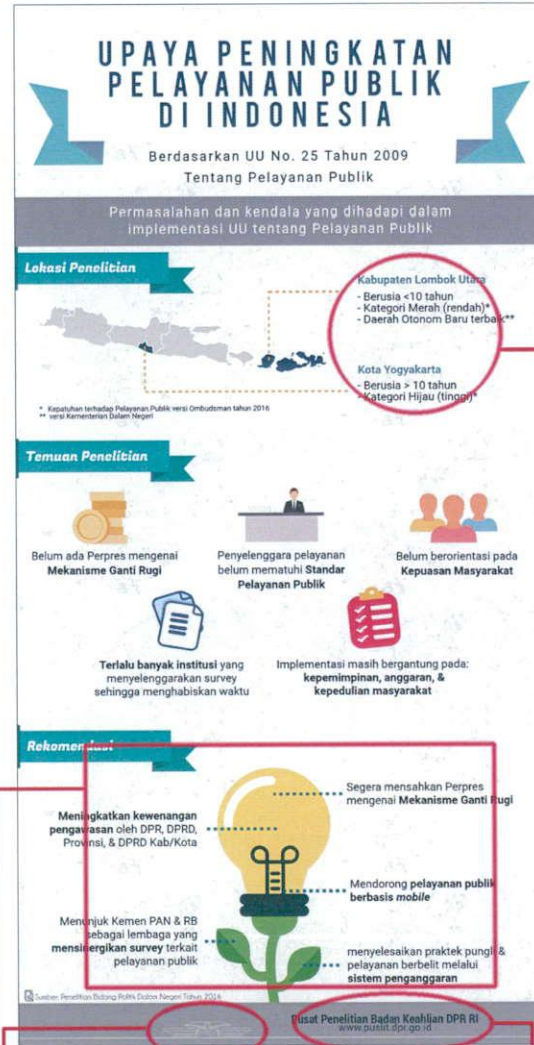
- 1** segera mensahkan Perpres mengenai **MEKANISME GANTI RUGI**
- 2** **MENINGKATKAN KEWENANGAN PENGAWASAN** oleh DPR, DPRD Provinsi, & DPRD Kab/Kota
- 3** mendorong **PELAYANAN PUBLIK BERBASIS MOBILE**
- 4** menunjuk KemenPAN&RB sebagai lembaga yang **MENSINERGIKAN SURVEY** terkait pelayanan publik
- 5** menyelesaikan praktik pungli & pelayanan berbelit melalui **SISTEM PENGANGGARAN**





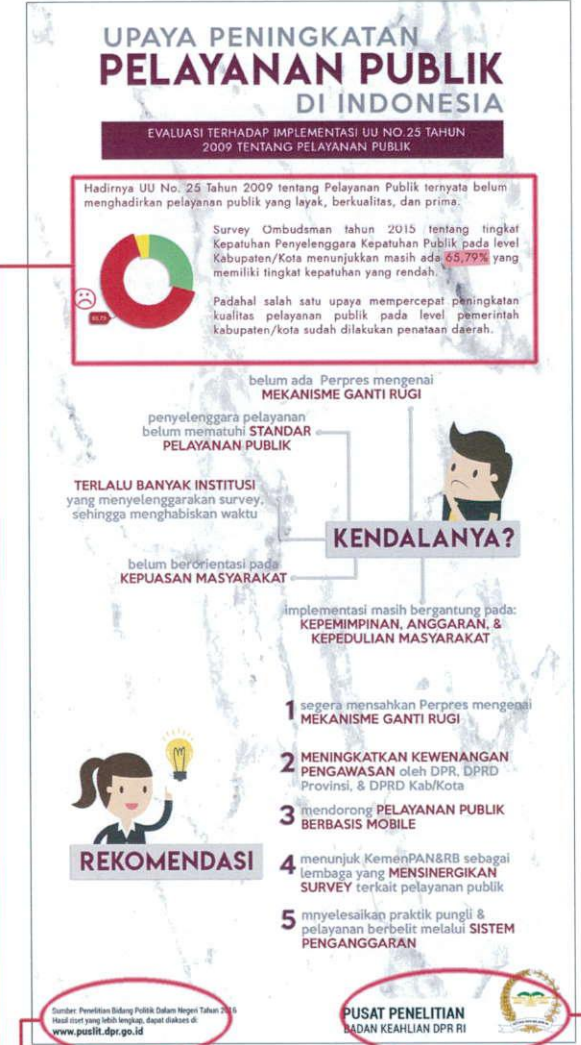
DRAFT 1

- masih memakai watermark "Piktochart"
- logo DPR agak terdistorsi dengan warna background, harus layout



DRAFT 2

- watermark diganti dengan identitas Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR
- menghilangkan logo DPR, diganti dengan siluet bangunan DPR
- rekomendasi dibuat berurutan agar jelas tingkatannya
- lokasi penelitian sebaiknya dihilangkan



DESAIN FINAL

- membuat "kop" infografis Pusat Penelitian yang mencantumkan: sumber penelitian, dan alamat website puslit.dpr.go.id
- menambah logo Puslit BK DPR RI
- mengganti lokasi penelitian dengan latar belakang penelitian

PERUBAHAN DESAIN



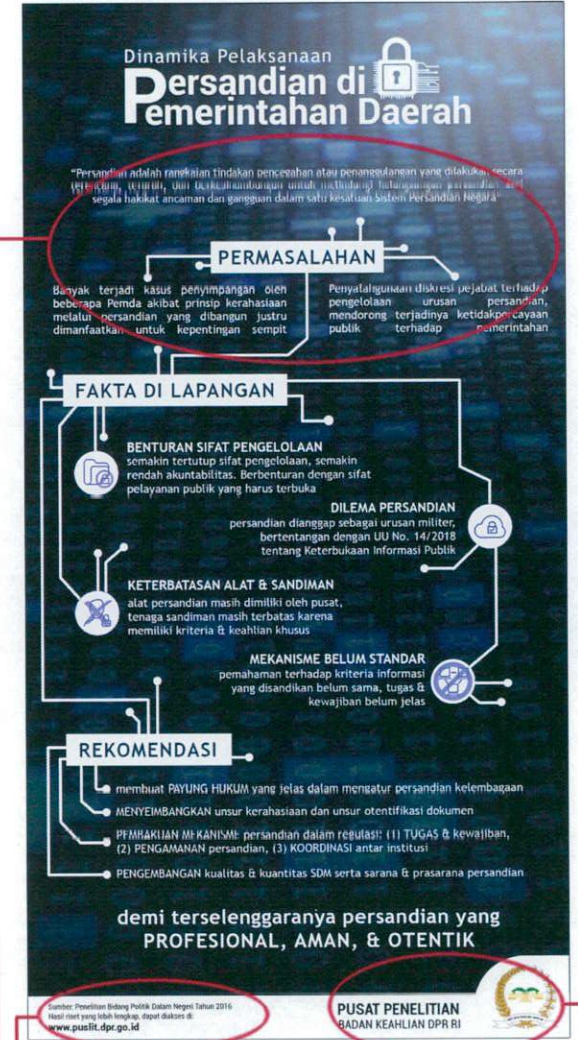
DRAFT 1

- masih memakai watermark "Piktochart"
- logo DPR agak terdistorsi dengan warna background, harus relay layout



DRAFT 2

- watermark diganti dengan identitas Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR
- menghilangkan logo DPR, diganti dengan siluet bangunan DPR
- background tidak berkaitan dengan substansi. Warna background perlu diganti agar kontras dengan tulisan



DESAIN FINAL

- membuat "kop" infografis Pusat Penelitian yang mencantumkan: sumber penelitian, dan alamat website puslit.dpr.go.id
- menambah logo Puslit BK DPR RI
- mengganti pendahuluan dengan pengertian persandian dan permasalahan yang diteliti

MODEL TATA KELOLA Dana Desa

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa:
"desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan & kualitas hidup masyarakat desa"

PERUBAHAN PENGATURAN Pendapatan Desa

UU No. 32 Tahun 2004 & PP No. 72 Tahun 2005	UU No. 6 Tahun 2014
- Alokasi Dana Desa 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi belanja pegawai - Jalur anggaran APBN hanya dalam bentuk bantuan langsung masyarakat	- Alokasi Dana Desa 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus - Jalur anggaran APBN, besaran alokasi yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap - Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

KENDALA PENGELOLAAN Dana Desa

- kinerja kabupaten kalah cepat dengan desa
- masyarakat masih pasif di musyawarah desa
- tenaga pendamping kurang memadai
- belum semua SDM menguasai Siskeudes
- jaringan internet kurang lancar

REKOMENDASI TATA KELOLA Dana Desa

- keteladanan kepemimpinan: visioner & misioner
- kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan
- memenuhi substansi*:
 - Kapasitas (responsif, perencanaan & anggaran baik, mobilisasi sumber daya lokal)
 - Efektivitas (kesesuaian perencanaan & pelaksanaan, tepat sasaran)
 - Akuntabilitas (otentik, transparan, bersih, bebas korupsi)

*menurut Sartono Eko (Dosen Kampus APMD Yogyakarta)

KESIMPULAN

UU Desa hadir untuk mengangkat harkat martabat desa. Dana desa diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang bertanggung jawab, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

UU Desa mendorong desa menjadi lembaga demokratisasi dan mandiri

Sumber: Hasil Penelitian Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2017
APMD Universitas Sebelas Maret, Law. Landakhean
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

powered by PIKTOCHART

DRAFT 1

- masih memakai watermark "Piktochart"
- logo DPR agak terdistorsi dengan warna background, harus relay layout

MODEL TATA KELOLA Dana Desa

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa:
"desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan & kualitas hidup masyarakat desa"

PERUBAHAN PENGATURAN Pendapatan Desa

UU No. 32 Tahun 2004 & PP No. 72 Tahun 2005	UU No. 6 Tahun 2014
- Alokasi Dana Desa 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi belanja pegawai - Jalur anggaran APBN hanya dalam bentuk bantuan langsung masyarakat	- Alokasi Dana Desa 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus - Jalur anggaran APBN, besaran alokasi yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap - Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

KENDALA PENGELOLAAN Dana Desa

- kinerja kabupaten kalah cepat dengan desa
- masyarakat masih pasif di musyawarah desa
- tenaga pendamping kurang memadai
- belum semua SDM menguasai Siskeudes
- jaringan internet kurang lancar

REKOMENDASI TATA KELOLA Dana Desa

- keteladanan kepemimpinan: visioner & misioner
- kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan
- memenuhi substansi*:
 - Kapasitas (responsif, perencanaan & anggaran baik, mobilisasi sumber daya lokal)
 - Efektivitas (kesesuaian perencanaan & pelaksanaan, tepat sasaran)
 - Akuntabilitas (otentik, transparan, bersih, bebas korupsi)

*menurut Sartono Eko (Dosen Kampus APMD Yogyakarta)

KESIMPULAN

UU Desa hadir untuk mengangkat harkat martabat desa. Dana desa diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang bertanggung jawab, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

UU Desa mendorong desa menjadi lembaga demokratisasi dan mandiri

Sumber: Hasil Penelitian Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2017
APMD Universitas Sebelas Maret, Law. Landakhean
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
www.puslit.dpr.go.id

DRAFT 2

- watermark diganti dengan identitas Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR
- menghilangkan logo DPR, diganti dengan siluet bangunan DPR

MODEL TATA KELOLA Dana Desa

PERUBAHAN PENGATURAN Pendapatan Desa

UU No. 32 Tahun 2004 & PP No. 72 Tahun 2005	UU No. 6 Tahun 2014
- Alokasi Dana Desa 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi belanja pegawai - Jalur anggaran APBN hanya dalam bentuk bantuan langsung masyarakat	- Alokasi Dana Desa 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus - Jalur anggaran APBN, besaran alokasi yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap - Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

KENDALA PENGELOLAAN Dana Desa

- kinerja kabupaten kalah cepat dengan desa
- masyarakat masih pasif di musyawarah desa
- tenaga pendamping kurang memadai
- belum semua SDM menguasai Siskeudes
- jaringan internet kurang lancar

REKOMENDASI TATA KELOLA Dana Desa

- keteladanan kepemimpinan: visioner & misioner
- kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan
- memenuhi substansi*:
 - Kapasitas (responsif, perencanaan & anggaran baik, mobilisasi sumber daya lokal)
 - Efektivitas (kesesuaian perencanaan & pelaksanaan, tepat sasaran)
 - Akuntabilitas (otentik, transparan, bersih, bebas korupsi)

*menurut Sartono Eko (Dosen Kampus APMD Yogyakarta)

KESIMPULAN

UU Desa hadir untuk MENINGKATKAN HARKAT MARTABAT DESA. Dana desa diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang bertanggung jawab, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

UU Desa mendorong desa menjadi LEMBAGA DEMOKRASI & MANDIRI

Sumber: Penelitian Kebijakan Politik Dalam Negeri Tahun 2017
Hasil riwat yang telah lengkap, dapat diakses di:
www.puslit.dpr.go.id

PUSAT PENELITIAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

DESAIN FINAL

- membuat "kop" infografis Pusat Penelitian yang mencantumkan: sumber penelitian, dan alamat website puslit.dpr.go.id
- menambah logo Puslit BK DPR RI
- menghilangkan kalimat pengantar karena kurang relevan dengan isi
- mengganti jenis font agar mudah terbaca

PERUBAHAN DESAIN



DRAFT 1

- masih memakai watermark "Piktochart"
- logo DPR agak terdistorsi dengan warna background, harus relay layout



DRAFT 2

- watermark diganti dengan identitas Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR
- menghilangkan logo DPR, diganti dengan siluet bangunan DPR



DESAIN FINAL

- membuat "kop" infografis Pusat Penelitian yang mencantumkan: sumber penelitian, dan alamat website puslit.dpr.go.id
- menambah logo Puslit BK DPR RI
- menambahkan substansi infografis sesuai masukan dari peneliti
- menambahkan permasalahan penelitian

TESTIMONI

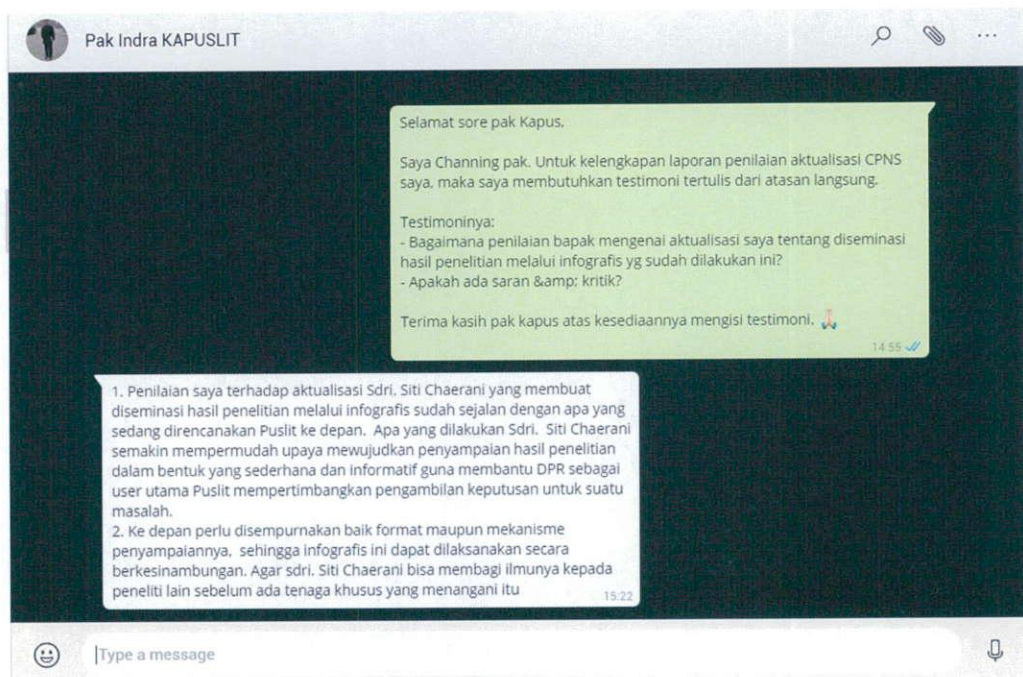
"Diseminasi Hasil Penelitian Kelompok Bidang PDN melalui Infografis"

oleh Siti Chaerani Dewanti



DR. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
Ketua Pusat Penelitian Badan Keahlian

“...sudah sejalan dengan apa yang sedang direncanakan Puslit ke depan... mempermudah upaya mewujudkan penyampaian hasil penelitian dalam bentuk yang sederhana dan informatif, guna membantu DPR sebagai user utama Puslit..”



Screen capture testimoni Kapuslit melalui whatsapp

TESTIMONI

"Diseminasi Hasil Penelitian Kelompok Bidang PDN melalui Infografis"

oleh Siti Chaerani Dewanti



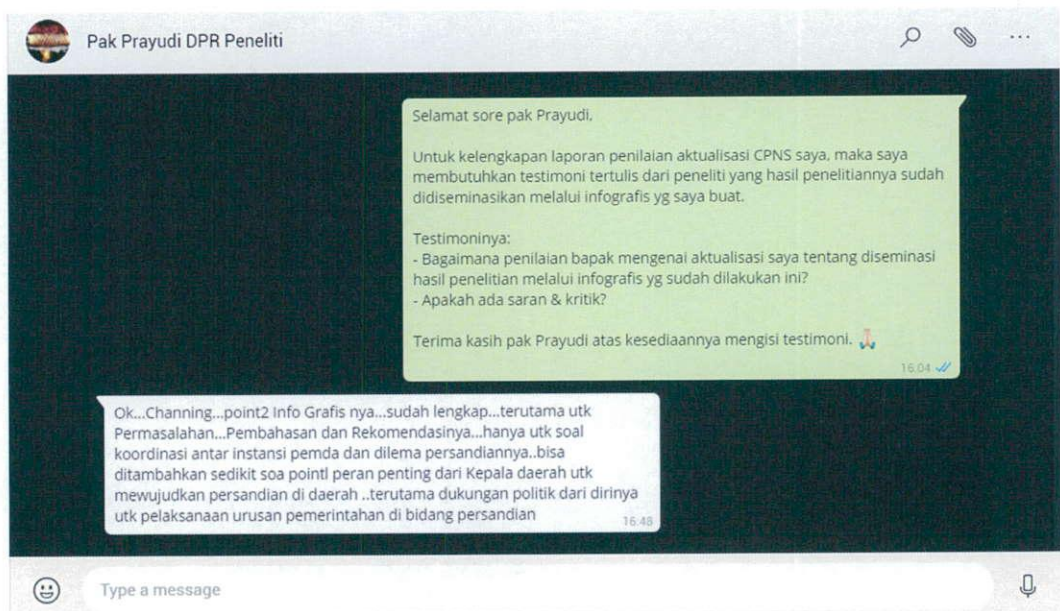
Drs. Prayudi, M.Si

Peneliti Utama Bidang Politik Dalam Negeri

“

...point-point infografis sudah lengkap, terutama untuk permasalahan, pembahasan, dan rekomendasinya...

”



Screen capture testimoni Peneliti Bidang PDN melalui whatsapp